PENGANTAR SOSIOLOGI
MASYARAKAT PESISIR

ARIF SATRIA

Diterbitkan atas Kerja Sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB
dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2015
Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir/Arif Satria; cet.: 1; ed. 2-
Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015

xii + 150 hlm; 14,5 x 21 cm

Judul:
Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir
Arif Satria

Copyright ©2014, Arif Satria
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
All Rights reserved

Diterbitkan atas kerja sama antara Fakultas Ekologi Manusia IPB
dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Anggota IKAPI DKI Jakarta

Cetakan pertama: Juni 2015
YOI: 828.33.12.2015
Desain sampul: Anung H.

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10 Jakarta 10230
Tlp. 021-31926978; 3920114
Faks: 021-31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
http: www.obor.or.id
<table>
<thead>
<tr>
<th>Section</th>
<th>Page</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>KATA PENGANTAR</td>
<td>vii</td>
</tr>
<tr>
<td>KATA PENGANTAR EDISI KEDUA</td>
<td>xi</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB 1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PENDAHULUAN</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB 2</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KARAKTERISTIK SOSIAL MASYARAKAT PESISIR</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB 3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT PESISIR</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB 4</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>DINAMIKA PERUBAHAN TEKNOLOGI PERIKANAN DAN FORMASI SOSIAL</td>
<td>56</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB 5</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KONFLIK-KONFLIK MASYARAKAT PESISIR</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB 6</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR</td>
<td>92</td>
</tr>
<tr>
<td>BAB 7</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT</td>
<td>107</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### Daftar Isi

<table>
<thead>
<tr>
<th>BAB</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>BAB 8</td>
<td>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR</td>
</tr>
<tr>
<td>DAFTAR PUSTAKA</td>
<td>138</td>
</tr>
<tr>
<td>INDEKS</td>
<td>143</td>
</tr>
<tr>
<td>TENTANG PENULIS</td>
<td>148</td>
</tr>
</tbody>
</table>
KATA PENGANTAR


Terbitnya buku ini tentu tidak lepas dari jasa berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu secara langsung maupun tidak secara langsung sehingga tidak memungkinkan penulis berterima
Kata Pengantar

kasih satu per satu. Namun, izinkan penulis menyebutkan beberapa orang di antaranya.

Pada kesempatan ini, penulis sangat berterima kasih kepada para guru dan dosen Sosiologi Perdesaan, khususnya kepada Pak Sajogyo, Pak Sediano Tjondronegoro, Pak Said Rusli, dan dosen lainnya. Selain itu penulis berterima kasih kepada Pak Didin S. Damanhuri yang telah mencerahkan penulis untuk berpikir secara strukturalis dan mendorong penulis untuk terus melahirkan karya-karya otentik.

Penulis sangat berterima kasih kepada Pak Rokhmin Dahuri yang telah memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada penulis untuk membantu beliau memimpin Departemen Kelautan dan Perikanan (sekarang Kementrian Kelautan dan Perikanan) serta yang telah membagi ilmu dan pengalamannya yang tentu sangat berharga bagi penulis. Tidak terlupa, kepada Pak Tridoyo Kusumastanto yang terus memberikan kesempatan penulis untuk menambah pengalaman lapangan sehingga dapat mengenal dunia kelautan dan perikanan dari dekat.


Tak lupa pula kepada Yoshiaki Matsuda Sensei dari Kagoshima University yang telah membuka mata penulis tentang dunia kelautan. Penulis pun berterima kasih kepada Pak Enang Haris beserta

Kepada rekan-rekan kerja di DKP, khususnya Mas Pupup, Bang Barlan, Mas Didik, Budi, Ramli dan Dodik, penulis haturkan terima kasih. Tentu, termasuk Pak Andin Taryoto, Pak Saut, Pak Adi, Pak Sun’an, dan rekan-rekan di lingkungan Setjen beserta Pak Sudirman Saad yang terus menjadi teman diskusi yang menyenangkan. Rekan-rekan di Pusat Kajian Agraria (PKA) IPB, PKSPL IPB, kepada mereka sudah sepatutnya penulis berterima kasih.


Bagi penulis, buku ini bukanlah akhir. Masih terus ada ikhtiar untuk selalu menyempurnakannya. Kesempurnaan itu sendiri tentu
Kata Pengantar

tidak pernah diketahui secara pasti kapan terwujud. Oleh karena itu, alangkah bersyukurnya penulis jika pembaca berkenan membantu untuk menyempurnakannya melalui kritik dan saran. Betapa pun, penulis berharap bukun ini dapat bermanfaat.

Bogor, Oktober 2002

Arif Satria
KATA PENGANTAR

Edisi Kedua

Kata Pengantar


Kritik dan masukan sangatlah diharapkan, karena dengan itulah proses mencari kebenaran tak akan pernah henti.

Bogor, Oktober 2014

Arif Satria
BAB 1
PENDAHULUAN

Sosiologi masyarakat pesisir merupakan bidang kajian sosiologi yang relatif baru berkembang di Indonesia. Padahal, seperti diketahui, secara geografis bangsa Indonesia merupakan negara kepulauan, yang lautnya mencapai 70 persen dari total wilayah. Kondisi laut yang demikian luas dan sumber daya alam yang begitu besar pada kenyataannya belum mampu membawa Indonesia menjadi bangsa yang maju. Salah satu sebabnya adalah pelaku usaha perikanan masih didominasi nelayan tradisional. Kondisi ini bukanlah suatu yang independen, melainkan merupakan akibat dari pilihan politik pembangunan masa lalu yang terlalu pro-darat dan mengabaikan kelautan. Akibatnya, masyarakat pesisir kurang berkembang dan terus dalam posisi marjinal.

Namun, dewasa ini mulai muncul kesadaran pentingnya pembangunan yang lebih memfokuskan pada kelautan, misalnya, berdirinya Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Diharapkan dengan adanya DKP, program-program pembangunan kelautan dan perikanan dapat dijalankan secara sistematis sehingga menghasilkan masyarakat yang sejahtera, khususnya masyarakat pesisir.

Ketika pembangunan kelautan dan perikanan tengah marak-maraknya, muncul sejumlah pertanyaan seputar efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan. Pertanyaan itu
Pendahuluan
didasarkan pada fakta empiris yang menunjukkan masih kurang tepatnya berbagai pendekatan program. Akibatnya, program pembangunan tersebut gagal. Ada contoh menarik, yaitu satu provinsi yang ingin sekali nelayannya menjadi tangguh sehingga pemerintah provinsi tersebut menyediakan kapal yang relatif besar bagi para nelayan padahal selama ini menggunakan perahu-perahu tradisional kecil. Yang terjadi, kapal tersebut justru hingga saat ini tidak bisa digunakan para nelayan. Meskipun niatnya baik faktanya belum tentu sesuai harapan karena pendekatan yang kurang pas. Mereka tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa untuk mengoperasikan sebuah kapal besar diperlukan keahlian yang cukup dan kemampuan teknis yang memadai. Belum lagi, modal yang cukup besar. Para nelayan tradisional jelas tidak punya modal yang cukup dan tidak punya kemampuan mengoperasikan armada yang begitu “modern”. Selain itu, kebiasaan one day fishing tidak begitu mudah diubah menjadi one week fishing, misalnya. Dengan menggunakan kapal besar, diharapkan nelayan akan melakukan kegiatan penangkapan di laut yang lebih jauh dan waktu yang diperlukan pun lebih lama. Namun, tentu ada konsekuensi-konsekuensi sosiologis dalam komunitas tersebut. Banyak peranan sosial yang akan hilang, yang semula dimainkan oleh nelayan semasa one day fishing tersebut. Peranan-peranan sosial itu patut dicari solusi penggantinya agar ketidakseimbangan sistem sosial yang selama ini telah mapan tetap lestari.

Contoh lainnya, banyak kalangan yang selalu menganggap jelek adanya pola patron-klien dalam masyarakat pesisir. Setiap kali ada program pemberdayaan, berbagai proposal guna memutus ikatan patron-klien disodorkan. Ada anggapan ikatan patron-klien hanyalah ikatan ekonomi yang mudah digantikan dengan ikatan-ikatan lainnya yang lebih formal, seperti koperasi. Langkah-langkah


Ihwal suku laut merupakan fenomena tersendiri yang menarik juga dicermati. Selama ini suku laut terkenal sebagai representasi masyarakat bahari, yakni masyarakat yang memiliki jiwa bahari
Pendahuluan

Seperti yang digambarkan dalam PKSPL (2001), kegiatan ekonomi penduduk suku laut di Indragiri Hilir yang utama adalah menangkap kerang, ikan, udang, dan mencari kayu di hutan bakau. Merawai dilakukan setiap hari oleh dua orang nelayan. Sistem bagi hasil yang digunakan adalah pendapatan bersih yang telah dikurangi sewa motor dan biaya minyak dibagi dua. Misalnya, penghasilan sehari sebesar Rp.100.000; setelah dikurangi sewa motor Rp.15.000 dan minyak Rp.5.000, pendapatan bersih menjadi Rp.80.000; jadi, masing-masing mendapatkan Rp.40.000. Meskipun salah satu nelayan merupakan pemilik perahu, sistem bagi hasil yang digunakan tetap sama seperti itu. Kegiatan penangkapan oleh nelayan dikenai retribusi/trayek melalui sebesar Rp.5.750 untuk satu perjalanan. Biasanya pembayaran dilakukan untuk tiga kali perjalanan sebesar lebih kurang Rp.15.000.
Sosiologi Masyarakat Pesisir


Pendahuluan

memang mengantarkan bagi mereka yang ingin mulai belajar tentang sosioiologi masyarakat pesisir.

BAB 2

KARAKTERISTIK SOSIAL MASYARAKAT PESISIR

Secara sosioologis, karakteristik masyarakat pesisir berbeda dengan karakteristik masyarakat agraris karena perbedaan karakteristik sumber daya yang dihadapi. Masyarakat agraris yang direpresentasi oleh kaum tani menghadapi sumber daya yang terkontrol, yakni pengelolaan lahan untuk produksi suatu komoditas dengan hasil yang relatif bisa diprediksi. Sifat produksi yang demikian memungkinkan tetapnya lokasi produksi. Ini menyebabkan mobilitas usaha yang relatif rendah dan elemen risiko pun tidak besar. Dalam hal ini, pembudi daya ikan dapat tergolong masyarakat petani karena relatif miripnya sifat sumber daya yang dihadapi, yakni, pembudi daya mengetahui berapa, di mana, dan kapan ikan ditangkap sehingga pola pemanenan lebih terkontrol. Pola pemanenan yang terkontrol tersebut tentu disebabkan adanya masukan yang terkontrol pula. Pembudi daya ikan tahu berapa masukan produksi (benih, makanan, teknik, dsb) yang mesti tersedia untuk mencapai hasil yang akan diinginkan.

Karakteristik tersebut berbeda sama sekali dengan nelayan. Nelayan menghadapi sumber daya yang hingga saat ini masih bersifat akses terbuka (open access). Karakteristik sumber daya seperti ini menyebabkan nelayan mesti berpindah-pindah untuk
memperoleh hasil maksimal, yang dengan demikian elemen risiko menjadi sangat tinggi. Kondisi sumber daya yang berisiko tersebut menyebabkan nelayan memiliki karakter keras, tegas, dan terbuka.

Namun, tidak sedikit nelayan yang juga merangkap sebagai petani. Hal ini ditunjang oleh kondisi ekosistem yang memang memungkinkan, seperti tersedianya areal lahan persawahan di sekitar pantai. Ada musim-musim tertentu bagi nelayan untuk turun ke sawah, sementara pada musim lainnya mereka kembali melaut. Rangkapan pekerjaan tersebut merupakan bagian dari pola adaptasi masyarakat pesisir terhadap kondisi ekologi yang mereka hadapi.

Akan tetapi, menurut Firth (1946) masyarakat nelayan tersebut memiliki kemiriapan dengan masyarakat tani, yakni bahwa sifat usahanya berskala kecil dengan peralatan dan organisasi pasar yang sederhana; eksploitasi yang sering berkaitan dengan masalah kerja sama; sebagian besar menyandarkan diri pada produksi yang bersifat subsisten; dan memiliki keragaman dalam tingkat dan perilaku ekonominya.

### Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

Sosiologi Masyarakat Pesisir
diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang
memerinci unsur-unsur masyarakat sebagai berikut:
(a) Manusia yang hidup bersama,
(b) Mereka bercampur untuk waktu yang lama,
(c) Mereka sadar sebagai suatu kesatuan, dan
(d) Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Tabel 1. Matriks Masyarakat

<table>
<thead>
<tr>
<th>Unsor-unsur Pengikat Sosial</th>
<th>Kerumunan</th>
<th>Golongan Sosial</th>
<th>Kategori Sosial</th>
<th>Jaringan Sosial</th>
<th>Kelompok Sosial</th>
<th>Himpunan</th>
<th>Komunitas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pasar orientasi</td>
<td>*</td>
<td>±</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>Sarana Interaksi</td>
<td>-</td>
<td>±</td>
<td>-</td>
<td>*</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>Aktivitas Interaksi</td>
<td>±</td>
<td>±</td>
<td>-</td>
<td>*</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>Keisimbangan</td>
<td>-</td>
<td>*</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>*</td>
<td>*</td>
</tr>
<tr>
<td>Identitas</td>
<td>-</td>
<td>*</td>
<td>-</td>
<td>±</td>
<td>*</td>
<td></td>
<td>*</td>
</tr>
<tr>
<td>Lokasi</td>
<td>0</td>
<td>±</td>
<td>0</td>
<td>±</td>
<td>±</td>
<td>±</td>
<td>*</td>
</tr>
<tr>
<td>Sistem Adat dan Norma</td>
<td>-</td>
<td>*</td>
<td>*</td>
<td>±</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>Organisasi Tradisional</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>±</td>
<td>*</td>
<td>-</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>Organisasi Buatan</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>-</td>
<td>±</td>
<td>-</td>
<td>*</td>
<td>+</td>
</tr>
<tr>
<td>Pimpinan</td>
<td>±</td>
<td>-</td>
<td>±</td>
<td>-</td>
<td>*</td>
<td>*</td>
<td>+</td>
</tr>
</tbody>
</table>

+: ada
- : tidak ada
□ : Mungkin ada mungkin tidak
0 : tidak relevan
* : unsur pengikat dasar

Sumber: Koentjaraningrat (1990)

Untuk memberikan pengertian masyarakat dari satuan-satuan sosial lainnya, Koentjaraningrat (1990) membuat suatu matriks

Namun, ketika membicarakan masyarakat pesisir, ada baiknya menempatkannya sebagai bagian dari kesinambungan peradaban sebagaimana sering diungkapkan Redfield. Menurut Redfield (1941), dalam Koentjaraningrat (1990) ada empat tipe komunitas, yaitu city (kota), town (kota kecil), peasant village (desa petani), dan tribal village (desa terisolasi) dengan setiap komunitas tersebut memiliki karakteristik kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Proses transformasi dari desa terisolasi ke kota ditandai dengan: (1) pengenduran adat-istiadat, (2) sekularisasi, dan (3) individualisasi.¹ Merujuk pada klasifikasi Redfield tersebut, masyarakat pesisir berada pada setiap tipe komunitas. Namun, di Indonesia kebanyakan masyarakat pesisir merupakan representasi tipe komunitas desa petani dan desa terisolasi. Meski demikian, masyarakat pesisir (khususnya yang bergerak di kegiatan perikanan) pada umumnya mencirikan apa yang disebut Redfield sebagai kebudayaan folk.²

---

¹ Koentjaraningrat (1990).
² Menurut Redfield dalam Koentjaraningrat (1990) kebudayaan folk berada dalam masyarakat petani perdesaan (peasant society) tetapi juga pada penduduk kota yang
Selanjutnya Redfield (1962) sebagaimana dikutip Dharmawan (2001) menjelaskan lebih jauh tentang karakteristik *folk-society* sebagai berikut:

"...Thus we may characterize the folk society as small, isolated, nonliterate, and homogenous, with a strong sense of group solidarity... There is no much division of labor in the folk society: what one person does is what another does... In the ideal folk society all the tools and ways of production are shared by everybody... For the obvious exception to the homogeneity of the folk society lies in the differences between what men do and know what women do and know... Of the ideal folk society as a group economically independent of all others: the people produce what they consume and consume what they produce... The ways in which the members of the society meet the recurrent problems of life are conventionalized ways; they are the result of long intercommunication within the group in the face of these problems; and conventionalized ways have become interrelated within one another so that they constitute a coherent and self-consistent system. Such a system is what we mean in saying that the folk society is characterized by 'a culture'... The member of folk society are guided in acting by previously established comprehensive and interdependent conventional understandings... In the folk society conventional behavior is strongly patterned: it tends to conform to a type or a norm..."

Lebih jauh, Redfield melihat bahwa kebudayaan *folk* tersebut dapat diteliti pada komunitas kecil. Dalam konteks masyarakat pesisir, masyarakat desa terisolasi (masyarakat pulau kecil) dan

---

Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

masyarakat desa pantai dapat merupakan gambaran wujud komunitas kecil itu yang memiliki beberapa ciri,\(^4\) yaitu:

(1) Mempunyai identitas yang khas (distinctiveness),

(2) Terdiri atas sejumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas (smallness) sehingga masih saling mengenal sebagai individu yang berkepribadian,

(3) Bersifat seragam dengan diferensiasi terbatas (homogeneity),

(4) Kebutuhan hidup penduduknya sangat terbatas sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasaran luar (allproviding self sufficiency).

Komunitas kecil tersebut sebenarnya dapat dibagi-bagi lagi dalam sebuah garis kontinuas yang menempatkan komunitas terisolasi (tribal community) pada titik ujung kiri dan komunitas petani (peasant community) pada titik ujung kanan. Komunitas kecil pada titik ujung kiri memiliki empat sifat di atas secara berlebihan, sementara komunitas kecil pada ujung kanan telah mengalami pengenduran keempat ciri tersebut. Sementara itu, antara dua titik ujung tersebut berisi variasi-variasi tipe komunitas kecil yang tempatnya bergantung pada banyak sedikitnya ciri yang dimiliki.\(^5\)

---

\(^4\) Lihat Koeniaraningrat (1990) yang mengesktraksi cirri-ciri komunitas kecil dari Redfield (1955)

\(^5\) Koenjaraningrat (1990) hlm 141
Sosiologi Masyarakat Pesisir

Pada ujung kanan, *peasant community* didefinisikan oleh Redfield sebagai suatu "... masyarakat kecil yang tidak terisolasi, dan tidak memenuhi semua kebutuhan hidup penduduknya. Di satu pihak, mereka mempunyai hubungan horizontal dengan komunitaskomunitas petani lain di sekitarnya, tetapi di pihak lain juga secara vertikal memiliki hubungan dengan komunitas-komunitas di daerah perkotaan."

Dalam Koentjaraningrat (1990), digambarkan pula bahwa Redfield menganggap bahwa suatu komunitas kecil adalah bagian yang terintegrasi dari lingkungan alam, tempat komunitas kecil itu berada, sehingga suatu komunitas kecil merupakan suatu sistem ekologi dengan masyarakat dan kebudayaan penduduk serta lingkungan alam setempat sebagai dua unsur pokok. Fenomena itu berada dalam suatu lingkaran pengaruh timbal balik yang mantap. Dengan demikian, tipe komunitas kecil pada masyarakat pesisir merupakan sistem ekologi, yang dapat menggambarkan betapa kuatnya interaksi antara masyarakat pesisir dengan lingkungan pesisir dan laut.

Selanjutnya, hal tersebut dapat diterangkan dengan mengacu pada pemikiran Kluckhohn tentang hakikat hidup manusia. Bila meminjam kerangka Kluckhohn, masyarakat pesisir yang bertipe desa pantai dan desa terisolasi dicirikan oleh sikapnya terhadap alam dan manusia. Terhadap alam, umumnya mereka ada yang tunduk dan ada pula yang berusaha menjaga keselarasan dengan alam. Sikap tunduk itu dilatarbelakangi pandangan mereka bahwa alam memiliki kekuatan magis, yang bila mengacu pada pemikiran August Comte sikap tersebut merupakan salah satu ciri dari tahap teologis dalam perkembangan masyarakat. Upaya sedekah laut atau *nadran*

---

6 Koentjaraningrat (1990) hlm 141
7 Koentjaraningrat (1990)
sebenarnya merupakan bagian dari sikap ketundukan pada alam laut. Sementara adanya awig-awig di Lombok atau sasi di Maluku, misalnya, merupakan salah satu bentuk sikap masyarakat pesisir yang hendak selaras dengan alam. Tentu ciri masyarakat pesisir di dua tipe komunitas tersebut berbeda dengan tipe kota kecil dan kota besar, dengan masyarakat di dalamnya memiliki kecenderungan menguasai alam lewat praktik-praktik pembangunan yang merusak alam serta bercirikan individualisme yang menilai tinggi usaha atas kemampuan sendiri.

Tabel 2. Kerangka Kluckhon

<table>
<thead>
<tr>
<th>Orientasi Nilai Budaya</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pandangan manusia terhadap alam (MA)</td>
</tr>
<tr>
<td>Hakekut hubungan antara manusia dengan sesamanya (MM)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Koentjaranigrat (1990)

Sementara itu, lebih jauh untuk menjelaskan tipe solidaritas pada masyarakat folk tersebut, perlu digunakan kerangka Emile Durkheim yang membagi tipe solidaritas menjadi dua, yakni tipe solidaritas mekanik dan tipe solidaritas organik. Ciri solidaritas mekanik ditandai dengan masih kuatnya kesadaran kolektif (collective conscience) sebagai basis ikatan sosial. Hal ini disebabkan oleh homogenitas masyarakat mengingat masyarakat tersebut belum mengalami division of labour sebagaimana masyarakat perkotaan. Sistem hukumnya juga bersifat represif sebagai bentuk
kemarahan kolektif yang juga berarti belum berlakunya hukum formal dalam mengatur kehidupan. Maraknya pembakaran kapal atau perahu oleh nelayan lokal karena menggunakan alat tangkap terlarang merupakan salah satu potret bagaimana sistem hukum represif yang berlaku dalam masyarakat pesisir tersebut. Hal ini berbeda sekali dengan sistem hukum pada tipe solidaritas organik yang lebih menekankan hukum restitutif yang bersifat memulihkan. Hukum restitutif berfungsi mempertahankan atau melindungi pola saling kebergantungan yang kompleks antarberbagai individu yang berspesialisasi atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam tipe hukum ini, sanksi yang diberikan bersifat memulihkan keadaan dan bukan balas dendam. Secara ringkas sifat-sifat pokok dari dua tipe solidaritas tersebut dapat dilihat dalam kerangka berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Solidaritas Mekanik</th>
<th>Solidaritas Organik</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pembagian Kerja Rendah</td>
<td>Pembagian Kerja Tinggi</td>
</tr>
<tr>
<td>Kesadaran Kolektif Kuat</td>
<td>Kesadaran Kolektif Lemah</td>
</tr>
<tr>
<td>Hubungan Represif Dominan</td>
<td>Hukum Restitutif Dominan</td>
</tr>
<tr>
<td>Konsensus Terhadap Pola-pola normatif itu</td>
<td>Secara Relatif Saling Ketergantungan itu</td>
</tr>
<tr>
<td>Penting</td>
<td>Tinggi</td>
</tr>
<tr>
<td>Secara Relatif Saling Ketergantungan itu</td>
<td>Secara Relatif Saling Ketergantungan itu</td>
</tr>
<tr>
<td>Rendah</td>
<td>Tinggi</td>
</tr>
<tr>
<td>Bersifat Primitif atau Perdesaan</td>
<td>Bersifat Industrial Perkotaan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Johnson (1986)

Untuk lebih memperjelas karakteristik masyarakat pesisir sebagai representasi tipe komunitas desa pantai dan desa terisolasi tersebut, berikut ini akan diuraikan secara singkat dari berbagai
Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

aspek, yaitu: (1) sistem pengetahuan, (2) sistem kepercayaan, (3) peran perempuan, (4) struktur sosial, dan (5) posisi sosial nelayan.

1. Sistem Pengetahuan


16
Begitu pula yang terjadi pada masyarakat suku laut. Sistem pengetahuan tradisional nelayan suku laut terhadap lingkungan hidupnya cukup tinggi. Hanya saja, karena belum dibarengi dengan pengetahuan modern tentang dunia luar, kebanyakan nelayan kurang mampu memanfaatkan peluang-peluang yang tersedia dibanding masyarakat miskin lainnya. Cukup banyak pengetahuan tradisional nelayan suku laut yang bersifat positif dan perlu dikembangkan, seperti pengetahuan tentang kondisi dan rahasia alam yang berkaitan dengan musim ikan, tingkah laku organisme laut, dan berbagai keterampilan tradisional.


Pengetahuan lainnya adalah tentang pemeliharaan sampan (perahu) melalui cara pengasapan badannya dengan membakar daun nipah dalam waktu tertentu agar kayu sampan (perahu) awet dan tidak dimakan binatang laut, seperti kapang (merusak dan pelobang kayu) dan krikip (binatang yang menempel di kayu). Selain itu, suku nelayan Duano juga ahli dalam pekerjaan menacik tongkat dengan memanfaatkan ilmu gaya berat melalui pasang-surut air laut dan

---
8 Ilustrasi tentang suku laut bersumber dari pengalaman penulis melakukan studi di Indragiri hilir dalam sebuah kegiatan yang dilakukan PKSPL IPB tahun 2001
Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

terampil pula dalam dunia selama-menyelam yang diwariskan secara turun-temurun.

Pengetahuan lokal (indigenous knowledge) tersebut merupakan kekayaan intelektual mereka yang hingga kini terus dipertahankan. Bahkan, dalam beberapa literatur ekonomi sumber daya, indigenous knowledge tersebut mendapat tempat sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan, seperti dalam metode RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Perihal ini yang mesti dikembangkan lebih jauh, bahwa sudah sepatutnya sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat nelayan dihargai dan sekaligus dikombinasikan dengan temuan-temuan modern dari lembaga riset ataupun perguruan tinggi.

2. Sistem Kepercayaan

Secara teologis, nelayan masih memiliki kepercayaan cukup kuat bahwa laut memiliki kekuatan magis, sehingga diperlukan perlakuan-perlakuan khusus dalam melakukan aktivitas penangkapan ikan agar keselamatan dan hasil tangkapan semakin terjamin. Tradisi tersebut, antara lain, masih dipertahankannya tradisi sowan ke suhu atau dukun-dukun dalam rangka mendapatkan "keselamatan" saat melaut dan memperoleh hasil tangkapan yang baik (along). Sebagai contoh, hampir semua nelayan nakhoda yang berasal dari Wonokerto Pekalongan melakukan hal tersebut. Dalam setiap misi penangkapan ikan, memang nakhodalah yang paling bertanggung jawab terhadap keselamatan maupun hasil tangkapan.

Para suhu menganjurkan agar sebelum menangkap ikan, khususnya ketika kapal baru sampai di muara, para ABK harus menyalakan duo atau menyan (wewangian) di sekitar kapal. Pada saat melempar jaring ke laut, nelayan harus menebarkan bungabunga di sekitar jaring. Suhu tersebut dianggap memiliki kontribusi bagi kesuksesan mereka menangkap ikan. Tanpa sowan ke suhu, mereka
seolah-olah kurang percaya diri untuk melaut. Sebagai penghargaan atas jasa-jasa para suhu, dalam sistem bagi hasil ada bagian yang harus diberikan kepada suhu tersebut, yakni biasanya satu bagian.


Begitu pula di Kirdowono, perawatan perahu pun dilakukan secara magis. Seperti digambarkan Juwono (1998), perahu telah dipersonifikasi seperti manusia yang bisa sakit dan harus diobati. "Pengobatan" perahu tersebut dilakukan melalui kosokan atau penggosokan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Badan perahu dan palka di dalamnya dibersihkan, dan lumut-lumut yang menempel digosok dengan sabut kelapa atau pasir hingga bersih;

2. Perahu dicuci dengan air cucian beras atau banyu leri yang direndam daun pinang (areca cathecut), alang-alang (Impererata cylindrica), dan klayu, daun galing (Vitis trifolia), abu merang padi ketan hitam, dan berlian;
(3) Badan perahu dilumuri dengan *sambetan*, yaitu rampan rempah-rempah yang terbuat dari lempuyang, kunir, adas pulasari, dan jahe. Air cucian beras dan sambetan ini didapatkan dari dukun;

(4) Pemilik perahu mengadakan selamatan kecil di perahu dengan sesajian dan kemenyan disertai doa agar perahunya membawa rezeki yang besar dan terlindung dari bahaya.


3. Peran Perempuan

Aktivitas ekonomi perempuan merupakan gejala yang sudah umum bagi kalangan masyarakat strata bawah, tak terkecuali perempuan yang berstatus sebagai istri nelayan. Istri nelayan umumnya, selain banyak bergelut dengan urusan domestik rumah tangga, juga tetap menjalankan fungsi-fungsi ekonomi, baik dalam kegiatan penangkapan di perairan dangkal (seperti beachseine), pengolahan ikan, maupun kegiatan jasa dan perdagangan. Ada satu rumusan yang diungkapkan Polllac (1988), yaitu pembagian kerja keluarga nelayan adalah pria menangkap ikan dan anggota keluarga yang perempuan menjual ikan hasil tangkapan tersebut. Peran perempuan ini merupakan faktor penting dalam menstabilkan ekonomi pada beberapa masyarakat penangkap ikan karena pria mungkin menangkap ikan hanya kadang-kadang sementara perempuan bekerja sepanjang tahun. Hal ini juga sejalan dengan

Memang istri nelayan pada umumnya hanya menjalankan fungsi domestik dan ekonomi, dan tidak sampai pada wilayah sosial politik. Namun, kalau dicermati sebenarnya istri nelayan juga kreatif dalam menciptakan pranata-pranata sosial yang penting bagi stabilitas sosial pada komunitas nelayan. Hal ini tampak, misalnya, pada acara pengajian, arisan, serta simpan pinjam, yang juga memiliki makna penting dalam membantu mengatasi ketidakpastian penghasilan ekonomi (Kusnadi 2000). Karena itu, peran sosial istri nelayan tersebut tidak bisa dipandang kecil.

4. Posisi Sosial Nelayan

posisi nelayan secara kultural juga digambarkan Firth (1971) dalam buku terkenalnya *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*. Dalam buku itu Firth menggolongkan nelayan sebagai *peasant* yang memiliki karakteristik "disrespect, implying not merely a low economic level and small-scale semisubsistence production, but also a low cultural, even intellectual position." ⁹

Kendati status mereka rendah, keluarga nelayan sangat bangga dengan profesi mereka. Seperti dituliskan Goodwin ketika mengutip penuturan salah seorang istri nelayan:

"We don’t think you know how much we appreciate the hard, exhausting, and dangerous work you do, or that we understand what your blood, sweat, and tears produces. We are thankful for our home, our treasures, and the food we eat. We don’t know how to reach you anymore. Our lives as vast as the sea from which you fish. We want to love you and respect you...Every time you leave, you take other people’s souls with you. We sit looking at the fullmoon, wondering how and when you’re. The kids draw pictures of your boat and tell everyone with such pride in their eyes, “My daddy’s a fisherman”.

Rendahnya posisi sosial nelayan juga diakibatkan keterasingan nelayan. Keterasingan tersebut menyebabkan masyarakat nonnelayan tidak mengetahui lebih jauh bagaimana dunia nelayan itu serta sedikitnya waktu dan kesempatan nelayan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Tentu, ini disebabkan banyaknya alokasi waktu nelayan untuk kegiatan penangkapan ikan daripada untuk bersosialisasi dengan masyarakat nonnelayan yang memang secara geografis relatif jauh dari pantai.

Posisi sosial nelayan juga dapat dilihat secara politik. Menarik sebuah tesis yang dikemukakan oleh Goodwin (1990) dalam Satria

---

⁹ Dikutip dari Raymond Firth, 1966. *Malay Fishermen: Their Peasant Economy*

Kalau kita gunakan perspektif Marxis, faktor kapital memang merupakan kunci dalam terbentuknya kelas-kelas sosial. Semakin besar penguasaan kapital, maka semakin besar kesempatan menempati kelas atas. Semakin ke atas kelas sosialnya makin semakin besar pula kesempatan untuk memengaruhi proses politik, kebijakan publik, dan seterusnya. Pandangan kaum Marxis yang demikian merupakan turunan dari filsafat materialisme yang dikembangkan Karl Marx dan Engels. Intinya, masyarakat sebenarnya terdiri dari dua komponen pokok, yakni (1) infrastruktur (cara produksi yang terdiri dari kekuatan produksi—dalam konteks nelayan berupa kapal, alat tangkap, dan modal—dan hubungan produksi yang merujuk pada pemilikan atas kekuatan produksi), dan (2) suprastruktur (aspek kehidupan sosial, seperti politik, hukum, agama, dst). Dikatakan bahwa infrastruktur itulah yang akan menentukan suprastruktur, dan bukan sebaliknya. Artinya, kekuatan-kekuatan ekonomilah yang sebenarnya menentukan kehidupan politik, hukum, dan kehidupan sosial lainnya.

Kalau demikian halnya, maka posisi sosial nelayan akan secara otomatis meningkat seiring dengan peningkatan kapital mereka. Hal ini bisa terlihat dari HINSI yang pengurusnya adalah para elit nelayan bermodal. Merekaalah yang mampu merespons

Selain tidak bisa berbuat banyak terhadap produk kebijakan yang diambil pemerintah, secara empiris nelayan juga tidak mampu berbuat banyak menghadapi praktik-praktik perikanan dan nonperikanan di wilayah pesisir yang ternyata sangat mengganggu aktivitas mereka. Beberapa contoh praktik yang hingga saat ini masih terus mengganggu, antara lain, praktik trawl, praktik kapal asing, dan penambangan pasir. Ketiga contoh tersebut lebih merupakan persoalan ekonomi politik dari hanya sekadar persoalan sosial biasa.

Praktik trawl masih terus menghantui masyarakat nelayan tradisional. Memang diakui bahwa trawl merupakan alat tangkap yang sangat efisien. Negara mana pun tidak ada yang melarang
Karakteristik Sosial Masyarakat Pesisir

Tentunya hal tersebut cepat atau lambat akan sangat mempengaruhi kondisi ekonomi mereka karena melaut merupakan mata pencarian mereka.


Pengertian dan Penggolongan Nelayan

Nelayan sering didefinisikan sebagai orang yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di laut. Definisi ini mudah dibuat untuk konteks masyarakat tradisional. Menurut Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Revisi Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Pasal 1, angka 10 mendefinisikan nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. Sedangkan nelayan kecil (Pasal 1, angka 11 UU No. 45 Tahun 2009, menyebutkan bahwa nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan paling besar.
beroperasinya trawl, kecuali mengaturnya melalui sistem zonasi. Namun, harus diingat bahwa di negara-negara maju enforcement dapat berjalan sehingga kehadiran trawl tidak terlalu bermasalah bagi nelayan non-trawl, meski ada pula kasus-kasus di Jepang yang menunjukkan bahwa ternyata trawl pun bermasalah.


Lagi pula, menghadapi masalah kapal asing nelayan juga tidak bisa berbuat banyak, kecuali nelayan di Muara Angke yang mampu mengusir kapal-kapal asing. Bahkan, nelayan di pulau-pulau kecil seperti di Kepulauan Natuna kini semakin merasa terancam secara fisik sehingga ada beban psikologis (rasa takut) untuk melaut. 

25
berukuran 5 GT (gross ton). Dalam undang-undang perikanan ini, membedakan definisi antara nelayan dengan pembudidaya ikan. Pasal 1, angka 12, menyebutkan bahwa pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan, dan pasal 1 angka 13, menyebutkan bahwa pembudidaya ikan kecil adalah orang yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tentang pengertian nelayan tersebut, Ditjen Perikanan (2000) mendefinisikan nelayan sebagai orang yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan (binatang air lainnya, tanaman air). Orang yang hanya melakukan pekerjaan seperti membuat jaring, mengangkut alat-alat perlengkapan ke dalam perahu/kapal tidak dikategorikan sebagai nelayan. Namun, ahli mesin dan juru masak yang bekerja diatas kapal penangkap dimasukkan sebagai nelayan, walaupun mereka tidak secara langsung melakukan penangkapan. Sama halnya dengan penangkapan, pada kegiatan budi daya yang dikategorikan sebagai petani ikan adalah orang yang melakukan pekerjaan pemeliharaan ikan, baik itu anggota rumah tangga maupun buruh (tenaga kerja).

Selanjutnya Ditjen Perikanan (2002) mengklasifikasikan nelayan berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan, yaitu:

i. Nelayan/Petani ikan penuh, yaitu nelayan/petani ikan yang seluruh waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

ii. Nelayan/petani ikan sambilan utama, yaitu nelayan/petani ikan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.
Karacteristik Sosial Masyarakat Pesisir

Selain melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan, nelayan kategori ini bisa jadi mempunyai pekerjaan lain. iii. Nelayan/petani ikan sambil tambahan, yaitu nelayan/petani ikan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan/pemeliharaan ikan/binatang air lainnya/tanaman air.

Ada dua cara untuk menghitung jumlah nelayan, yaitu (i) melalui pendekatan unit ekonomi Rumah Tangga/Perusahaan Perikanan dan; (ii) melalui pendekatan rumah tangga (sebagai sumber data adalah nelayan), yakni rumah tangga perikanan dan rumah tangga buruh perikanan. Pengalaman menunjukan bahwa cara yang pertama memiliki kelemahan: adanya kemungkinan penghitungan dua kali, karena satu orang nelayan dalam satu tahun mungkin bekerja pada dua rumah tangga/perusahaan perikanan yang berbeda. Karena itu, cara yang terbaik adalah cara yang kedua. Namun, mengingat kesulitan yang dihadapi, data nelayan yang disajikan dalam publikasi ini diestimasi berdasarkan cara yang pertama.


nelayan pemilik masih bisa berlaku karena pemilik perahu masih benar-benar ikut melakukan kegiatan penangkapan ikan.


_Pertama, peasant-fisher_ atau nelayan tradisional, yang biasanya lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (subsistensi). Sebutan ini muncul karena alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan) dan bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha (Satria 2001). Umumnya, mereka masih menggunakan alat tangkap tradisional dayung atau sampan tidak bermotor dan masih menggunakan anggota keluarga sebagai tenaga kerja utama. Ciri-ciri umum nelayan sebagai _peasant_ juga pernah digambarkan Firth (1971) sebagai berikut:
"These fishermen as forming part of a peasant economy: with relatively simple, non-mechanical technology; small-scale production units; and a substantial production for such an economy may be outlined. In peasant economy the manner of apportioning the product of the economy process is ini some cases not very clearly defined in an overt way—as when the producing unit is an individual family; in other cases it may be laid down by definite rules of custom, and be quite complex."¹⁰


Ketiga, adalah commercial fisher, yaitu nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan. Skala usahanya sudah membesar yang dicirikan dengan besarnya jumlah tenaga kerja dan status yang berbeda: dari buruh hingga manajemen. Teknologi yang digunakan pun sudah lebih modern, membutuhkan keahlian tersendiri baik dalam mengoperasikan kapal maupun alat tangkap, misalnya, nelayan purse seine di Pekalongan.

Keempat, adalah industrial fisher, yang pengertianya dapat mengacu pada Pollnac (1998), yakni: (a) diorganisasi dengan

¹⁰ Firth, Raymond. 1971. Malay Fishermen: Their Peasant Economy
Sosiologi Masyarakat Pesisir
cara-cara yang mirip dengan perusahaan agroindustri di negara-negara maju; (b) secara relatif lebih padat modal; (c) memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada perikanan sederhana, baik untuk pemilik maupun awak perahu dan (d) menghasilkan ikan kaleng dan ikan beku yang berorientasi ekspor.

Nelayan skala besar berciri besarnya kapasitas teknologi penangkapan dan jumlah armada dengan orientasi lebih pada keuntungan (profit oriented) dan melibatkan buruh nelayan sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang berorganisasi kerja lebih kompleks.

Tabel 4. Penggolongan Nelayan Berdasarkan Karakteristik Usaha

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis</th>
<th>Orientasi Ekonomi dan Pasar</th>
<th>Tingkat Teknologi</th>
<th>Hubungan Produksi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Usaha Tradisional</td>
<td>Subsisten, rumah tangga</td>
<td>Rendah</td>
<td>Tidak hierarki, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen</td>
</tr>
<tr>
<td>Usaha Post-Tradisional</td>
<td>Subsisten, surplus, rumah tangga, pasar domestik</td>
<td>Rendah</td>
<td>Tidak hierarki, status terdiri dari pemilik dan ABK yang homogen</td>
</tr>
<tr>
<td>Usaha Komersia</td>
<td>Surplus, pasar domestik, ekspor</td>
<td>Menengah</td>
<td>Hierarki, status terdiri dari pemilik, manajemen, ABK yang heterogen</td>
</tr>
<tr>
<td>Usaha Industrial</td>
<td>Surplus, ekspor</td>
<td>Tinggi</td>
<td>Hierarki, status terdiri dari pemilik, manajemen, ABK yang heterogen</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Charles (2001) dalam bukunya dengan judul *Sustainable Fishery Systems*, menggambarkan hubungan *human systems* dengan aktivis perikanan yang meliputi (kelompok nelayan, teknologi penangkapan ikan, struktur komunitas nelayan dan rumah tangga, serta pola penangkapan) dimana semuanya merupakan internal
faktor sosial ekonomi dan lingkungan sedangkan untuk eksternal faktor merupakan aspek kebijakan pasar dan aturan perikanan.

Charles (2001), mendefinisikan tipologi nelayan berdasarkan pada unsur ekologi (lingkungan), pola human systems dan aktivitas perikanan menjadi empat kategori nelayan yaitu:

1. *Subsistence fishers*: nelayan yang menangkap ikan untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari;
2. *Native/indigenous/aboriginal fishers*: kelompok nelayan yang mempunyai pola aktivitas nelayan tradisional dan seringkali hanya sebagai nelayan subsisten;
3. *Recreational fishers*: nelayan yang melakukan aktivitas perikanan hanya sebagai rekreasi saja;

Skema Tipologi nelayan (diadopsi dari Charles, 2001).
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Karakteristik Nelayan</th>
<th>Alat Tangkap</th>
<th>Tipologi Nelayan</th>
<th>Isu Kritis</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Nelayan sampan dan bodi susun atau bodi batang.</td>
<td>Jaring/pukat senar (<em>gilnet</em>) monofilamen dan multifilamen) dan pancing (<em>hand line</em>).</td>
<td>Subsisten</td>
<td>• Sebagai nelayan subsisten, hasil laut untuk kebutuhan sehari-hari dan dijual ke tetangga;</td>
<td>Dengan menggunakan bodi susun atau sampan. Tidak mengenal musim (setiap desa penelitian di seluruh Rote Ndau).</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Nelayan perahu layar</td>
<td>Dengan menggunakan pancing rawai (menangkap sirip hiu) dan menggunakan tangan untuk menangkap lola dan teripang</td>
<td>Komersial dengan alat tangkap tradisional</td>
<td>• Dapat mengganggu pertumbuhan karang karena mengancap dengan tombak.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>• Area penangkap berada di wilayah Perairan Australia; • Kendala faktor alam antara ombak dan cuaca; • Kendala wilayah territorial perbatasan dengan sistem aturan dari Australia; • Harga sirip hiu dan teripang yang tinggi sehingga sampai saat ini masih diminati nelayan, terutama nelayan Bajo.</td>
<td>Didakukan pada Musim Timur, dan melaut dalam jangka waktu lama (Papela, Oelaba).</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Karakteristik Nelayan</td>
<td>Alat Tangkap</td>
<td>Tipologi Nelayan</td>
<td>Isu Kritis</td>
<td>Keterangan</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>-----------</td>
<td>------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 3.  | Nelayan Lampara Siang | Pukat (mini purse seine) | Komersial | • Menggunakan alat tangkap mini purse seine, sehingga dimungkinkan dapat menangkap biota laut yang dilarang ditangkap menurut undang-undang;  
• Minimnya akses pemasaran sehingga menyebabkan nelayan tidak mempunyai pilihan dalam menjual hasil tangkapannya kecuali ke papalele dengan keputusan harga rendah berada di papalele;  
• Minimnya sarana industri pasca tangkap bagi hasil lampara. | Dari Pulau Rote ke Pulau Nuse (Musim Timur)  
Di sekitar Perairan Selatan Rote (Musim Barat).  
Ditemukan di Tulandale, Kelurahan Metina dan Desa Namodela dan Onggae Desa Tunggonamo. |
| 4.  | Nelayan Lampara Malam | Pukat (mini purse seine) | Komersial | Jaring lompo (jaring dogol) |

|  |  |  |  | • Menggunakan alat tangkap mini purse seine, sehingga dimungkinkan dapat menangkap biota laut yang dilarang ditangkap menurut undang-undang;  
• Minimnya akses pemasaran sehingga menyebabkan nelayan tidak mempunyai pilihan dalam menjual hasil tangkapannya kecuali ke papalele dengan keputusan harga rendah berada di papalele;  
• Minimnya sarana industri pasca tangkap bagi hasil lampara. | Dari Pulau Rote ke Pulau Nuse (Musim Timur)  
Di sekitar Perairan Selatan Rote (Musim Barat).  
Ditemukan di Desa Ndau dan Onggae Desa Tunggonamo. |

<p>|  |  |  |  |  | Ditemukan di Batutta |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Karakteristik Nelayan</th>
<th>Alat Tangkap</th>
<th>Tipologi Nelayan</th>
<th>Isu Kritis</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Nelayan udang</td>
<td>Pukat senar udang <em>(trammel net)</em></td>
<td>Komersial</td>
<td>• Pendeknya musim udang (hanya terjadi pada Bulan April-Agustus); Minimnya akses pemasaran sehingga dijual ke papalele dengan harga rendah, yaitu Rp.50.000;</td>
<td>Waktu penangkapan Bulan Agustus-September. Ditemukan di Desa Oetefu</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Bagang Malam</td>
<td>Pukat <em>(mini purse seine)</em></td>
<td>Komersial</td>
<td>• Menggunakan alat tangkap <em>mini purse seine</em>, sehingga dimungkinkan dapat menangkap biota laut yang dilarang ditangkap menurut undang-undang; Minimnya akses pemasaran sehingga menyebabkan nelayan tidak mempunyai pilihan dalam menjual hasil tangkapannya kecuali ke papalele dengan keputusan harga rendah berada di papalele; Minimnya sarana industri paska tangkap bagi hasil lampara</td>
<td>Waktu penangkapan malam hari di Musim Timur dan Barat. Ditemukan di Pulau Ndao, Batutua dan Namondao</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Nelayan Tuna (Bodi Batang dan Bodi Susun)</td>
<td>Pancing Tonda dan Pancing Rawai dasar.</td>
<td>Komersial</td>
<td>• Komoditas tuna sebagai tumpuan penangkapan nelayan bodi/sampan; Belum mempunyai rumpon tuna menjadikan fishing ground jauh (45-70 mil dari Rote); Sistem pemasaran yang belum memadai.</td>
<td>Musim Timur dan Musim Barat. Ditemukan di Papela</td>
</tr>
<tr>
<td>No.</td>
<td>Karakteristik Nelayan</td>
<td>Alat Tangkap</td>
<td>Tipologi Nelayan</td>
<td>Isu Kritis</td>
<td>Keterangan</td>
</tr>
<tr>
<td>-----</td>
<td>----------------------</td>
<td>--------------</td>
<td>-----------------</td>
<td>------------</td>
<td>------------</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Nelayan Ikan dasar (Bodi Susun)</td>
<td>Pancing Tenda</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Bugan Tancap</td>
<td>Jaring</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Sero/Lutu</td>
<td>Pukat meeting</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Satria, Suncko dan Sofyanto (TNC-FEMA IPB, 2013)
BAB 3

STRUKTUR SOSIAL MASYARAKAT PESISIR


Pembahasan tentang struktur sosial pada bab ini hanya akan dibatasi pada struktur yang terbentuk dari hubungan produksi

---
Sosiologi Masyarakat Pesisir

(termasuk pasar) pada usaha perikanan, baik penangkapan maupun budi daya.

**Patron-Klien: Ciri Umum Struktur Sosial Masyarakat Pesisir**


Tentang hubungan patron-klien, Legg (1983) *dalam* Najib (1999) mengungkapkan bahwa tata hubungan patron-klien umumnya berkaitan dengan:

1. Hubungan di antara pelaku yang menguasai sumber daya tidak sama;
2. Hubungan khusus yang merupakan hubungan pribadi dan mengandung keakraban;
3. Hubungan yang didasarkan atas asas saling menguntungkan.

Jadi, karakteristik hubungan patron-klien di atas sejalan dengan kategori Wolf tentang dua macam kelompok teman, yaitu yang berdasarkan *emotional friendship* dan *instrumental friendship*. Artinya, hubungan patron-klien pada umumnya merupakan ikatan *emotional friendship* sekaligus *instrumental friendship*.\(^2\) Dua

---

\(^2\) Lihat Kamanto Sunarto, 1993, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta; Lembaga Penerbit FE UI)

39
Struktur Sosial Masyarakat Pesisir

kategori ini dapat dijadikan kerangka untuk melihat sejauh mana kekuatan ikatan patron-klien tersebut.

Ahli lainnya, Koentjaraningrat (1990), melihat pola patron-klien dalam kerangka jaringan sosial. Pola patron-klien merupakan pola hubungan yang didasarkan pada principle of reciprocity atau asas timbal balik. Merujuk pada Foster, dalam Koentjaraningrat (1990), juga ditemukan istilah lain untuk menjelaskan gejala patron-klien, yaitu dyadic contract, atau hubungan antara dua satuan yang bekerja sama.

Sementara itu, James Scott (1993) melihat hubungan patron-klien sebagai fenomena yang terbentuk atas dasar ketidaksamaan dan sifat fleksibilitas yang tersebar sebagai sebuah sistem pertukaran pribadi. Dalam pertukaran tersebut, ada arus dari patron ke klien dan sebaliknya. Menurut Scott (1993), arus dari patron ke klien mencakup: (1) penghidupan subsistensi dasar, berupa pemberian pekerjaan tetap, penyediaan saprodi, jasa pemasaran, dan bantuan teknis, (2) jaminan krisis subsistensi, berupa pinjaman yang diberikan pada saat klien menghadapi kesulitan ekonomi, (3) perlindungan, berupa perlindungan terhadap klien baik dari ancaman pribadi (musuh pribadi) maupun ancaman umum (tentara, pejabat, pemungut pajak, dsb), (4) memberikan jasa kolektif, berupa bantuan untuk mendukung sarana umum setempat (sekolah, tempat ibadah, jalan, dsb), serta mensponsori festival dan perayaan desa.

Sementara itu, arus dari klien ke patron, menurut Scott (1993), sulit untuk dikategorisasi. Sebabnya, klien adalah “orangnya” patron, yang menyediakan tenaga dan keahliannya untuk kepentingan patron, apa pun bentuknya, seperti jasa pekerjaan dasar, jasa tambahan bagi rumah tangga patron, jasa domestik pribadi, dan juga klien merupakan anggota setia dari faksi lokal patron tersebut. Meskipun apa yang digambarkan Scott tersebut merupakan hasil
kajianya berdasarkan konteks sosial agraris, gambaran tentang hubungan patron-klien dapat membantu untuk menggambarkan kondisi masyarakat pesisir.


Selanjutnya nelayan akan mencari utang kepada patron dengan jaminan ikatan pekerjaan atau hasil tangkapan yang dijual kepada patron dengan harga lebih rendah daripada harga pasar dan ditetapkan secara sepakat oleh patron. Misalnya, di Sape-Bima hasil tangkapan kakap merah yang berlaku di pasar Rp.22.000/kg harus dijual ke patron dengan harga Rp.15.000/kg. Ikatan patron-klien tersebut merupakan mekanisme pertukaran antara patron dan klien. Dalam hal ini, patron memberikan bantuan modal, kapal motor, dan alat tangkap kepada klien. Patron tersebut menyediakan berbagai bentuk bantuan yang diperlukan klien. Adapun cicilan pelunasan utang klien pada patron dibayarkan setiap penjualan hasil tangkapan.3

Dengan pola patron-klien yang demikian, klien sering dihadapkan pada sejumlah masalah, seperti tidak berakhirnya pelunasan kredit. Menurut patron, kliennya tidak disiplin dan mementingkan pengeluaran konsumtif seperti pembelian barang-

---

3 Kasus di Bima NTB ini merupakan hasil pengamatan penulis di lapangan melalui kegiatan yang dilakukan PKSPL IPB
barang elektronik. Di pihak lain, nelayan (klien) menganggap hal itu merupakan taktik patron untuk terus mengikat klien sehingga bisnisnya bisa terus berjalan.


Ikatan patron-klien serupa ditemukan juga di sekitar Kepulauan Riau. dengan mekanisme pertukaran jasa yang senada pula. Dalam hal ini, nelayan hanya dalam posisi sebagai price taker. Misalnya, di Pulau Busung, para nelayan harus menjual udang ke patron sebesar Rp. 45.000/kg, sementara harga di pasar sudah mencapai Rp. 50.000. Menghadapi kenyataan itu, nelayan tidak memiliki kekuatan untuk meningkatkan posisi tawar mereka, meskipun mereka sadar bahwa kondisi demikian sangat merugikan mereka.


---
⁴ Contoh pola patron-klien di kecamatan Mauk diperoleh dari pengalaman penulis dalam studi yang dilakukan LSI IPB tahun 2002
adalah orang yang memberikan bantuan uang kepada nelayan untuk kegiatan produksi maupun untuk kebutuhan rumah tangga, dan biasanya langgan berprofesi sebagai pengumpul ikan, udang, atau rajungan. Sebagai timbal baliknya, nelayan harus menjual hasil tangkapannya kepada langgan. Bagi nelayan rajungan, biasanya bantuan diberikan secara cuma-cuma tanpa ada kewajiban untuk membayar. Lebih unik lagi, bila jaring rajungan tersebut hilang di laut, pinjaman yang diberikan pun dianggap hilang, sehingga sering langgan memberikan lagi bantuan untuk membeli jaring rajungan yang baru. Namun, biasanya langgan akan selalu memberikan pinjaman kepada nelayan. Bila tidak, nelayan tersebut bisa beralih kepada langgan yang lain.

Kewajiban nelayan adalah menjual hasil tangkapannya kepada langgan. Harga rajungan yang dijual ke langgan lebih rendah dibandingkan harga pasar dengan selisih harga Rp.2.000/ kg. Perbedaan harga jual itu pun berlaku untuk udang, ikan, dan cumi. Bila nelayan yang terikat pada seorang langgan tidak menjual hasil tangkapannya kepada langgan tersebut, maka dia segera akan ditegur dan diperingatkan oleh langgan.

Sistem langgan pada alat tangkap sero sedikit berbeda dengan jaring rajungan. Untuk alat tangkap sero, nelayan diharuskan mengembalikan pinjaman modal yang diterima, tapi tidak untuk pinjaman sehari-hari (untuk kebutuhan hidup). Perbedaan ini terjadi karena biaya yang dibutuhkan untuk membuat sero cukup besar, yaitu mencapai Rp.2.500.000. Namun, kewajiban nelayan sero tetap sama dengan nelayan jaring rajungan, yaitu menjual hasil tangkapannya ke langgan.

Sistem langgan yang terbentuk di Kecamatan Mauk, Tangerang menunjukkan saling kebergantungan antara nelayan dan langgan. Dengan situasi tersebut, masing-masing pihak bersedia untuk
mengambil risiko dan konsekuensinya. Bagi seorang langgan yang harus selalu memberikan pinjaman kepada nelayan, risiko kerugian akan lebih besar pada saat hasil tangkapan nelayan sedikit, karena jumlah pinjaman relatif sama. Sementara itu, bagi nelayan, konsekuensi menjual dengan harga yang lebih rendah harus diterima meskipun pada saat hasil tangkapan banyak peluang untuk memperoleh untung lebih besar.

Fenomena patron-klien lainnya dapat ditemukan di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, yakni antara nelayan pencari telur ikan terbang (torani) atau sering disebut pa’orani dengan pedagang pengumpul (papalele).\(^5\) Torani memiliki nilai jual yang sangat tinggi berkisar Rp.150.000 hingga Rp.300.000 dan diekspor ke Jepang, Taiwan, dan Korea. Setiap kali melaut, pa’orani dapat menghasilkan 30-40 kg torani yang telah dikeringkan. Pa’orani memerlukan waktu 20-30 hari untuk melaut, dan masa melaut umumnya dilakukan pada bulan Mei hingga September. Untuk melaut pa’orani memerlukan modal yang umumnya diperoleh dari hasil pinjaman kepada papalele sekitar Rp.3.000.000 hingga Rp.7.000.000. Pinjaman modal itu kemudian dikembalikan dengan mengambil hasil torani sebesar 30%.


\(^5\) Urairan tentang pola patron-klien di Kabupaten Takalar ini bersumber dari Kompas, 4 Juli 2002
melalui hasil studi LPPM Unhas (1993) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan *sawi* sekitar Rp.30.000-Rp.60.000, juragan laut sekitar Rp.100.000-Rp.250.000, dan *punggawa* sekitar Rp.300.000 hingga Rp.1.500.000.


---

positif ini muncul karena memang secara riil institusi patron-klien mampu memacu kehidupan nelayan untuk keluar dari perangkap keterbelakangan.


### Tabel 6. Ciri-ciri Hubungan Tengkulak dan Nelayan di Kelurahan Pulau Panggang

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ciri Spesifik Hubungan Tengkulak-Nelayan</th>
<th>Pola Hubungan Tengkulak dan Nelayan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Ciri Umum</td>
<td>1. Kedua belah pihak menguasai sumber daya yang berbeda;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Hubungan terbentuk atas dasar saling percaya dan suasana kekeluargaan; dan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Hubungan yang berdasarkan azas saling menguntungkan serta memberi dan menerima.</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Ciri Khusus</td>
<td>1. Tidak bersifat eksplotatif;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>2. Tidak terdapat hubungan mengikat;</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>3. Kebebasan nelayan dalam memilih pembeli; dan</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>4. Terdapat peran nelayan dalam menentukan harga.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Anggraini, 2002
Struktur Sosial Masyarakat Pesisir

Kotak 1. Pengaruh Ikatan Patron Klien terhadap Pengelolaan Sumberdaya Pesisir


Sumber: Samiya, 2011.
### Tabel 7. Perbandingan Pengaruh Tengkulak pada Usaha Perikanan di Pulau Panggang.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Ciri</th>
<th>Muroami</th>
<th>Bubu</th>
<th>Ikan Hias</th>
<th>Budidaya</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pemberian Modal atau Pinjaman</td>
<td>Pinjaman alat tangkap (kapal, motor, jaring dan kompresor)</td>
<td>Pinjaman untuk biaya sehari-hari nelayan</td>
<td>Pemberian biaya pembelian BBM (Rp.25.000 sampai Rp.50.000/minggu)</td>
<td>Pinjaman untuk biaya sehari-hari</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pemberian bekal di laut (ransum)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Pinjaman untuk keluarga jika menginap di laut (babang)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pemilihan Alat Tangkap dan Sarana Budidaya</td>
<td>Ditentukan oleh nelayan pemilik</td>
<td>Ditentukan sendiri oleh nelayan</td>
<td>Ditentukan sendiri oleh nelayan</td>
<td>Ditentukan sendiri oleh nelayan</td>
</tr>
<tr>
<td>Penentuan Harga Ikan</td>
<td>Ditentukan oleh pengelola, namun kadang terjadi negosiasi oleh nelayan</td>
<td>Ditentukan oleh pengelola, namun kadang terjadi negosiasi oleh nelayan</td>
<td>Ditentukan oleh pengelola, namun kadang terjadi negosiasi oleh nelayan</td>
<td>Ditentukan oleh pengelola, namun kadang terjadi negosiasi oleh nelayan</td>
</tr>
<tr>
<td>Penetuan Jumlah Hasil Tangkapan/Panen</td>
<td>Tidak ada batasan minimum jumlah ikan yang harus ditangkap</td>
<td>Tidak ada batasan minimum jumlah ikan yang harus ditangkap</td>
<td>Terdapat batasan minimum jumlah ikan yang harus ditangkap</td>
<td>Tidak ada batasan minimum jumlah ikan yang harus dipanen</td>
</tr>
</tbody>
</table>


### Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial berarti pembebanan populasi berdasarkan kelas secara hierarkis (Sorokin 1962). Basis pembebanan kelas menurut Sorokin (1962) adalah hak dan previlege (rights and previlege),
kewajiban dan tanggung jawab (duties and responsibilities), nilai sosial dan privasi (social values and privations), serta kekuasaan dan pengaruhnya pada masyarakat (social power and influences among the members of a society). Sorokin (1962) membagi bentuk stratifikasi menjadi tiga, yakni (a) stratifikasi berdasar ekonomi (economically stratified), bila dalam suatu masyarakat terdapat perbedaan atau ketidaksetaraan status ekonomi, (b) stratifikasi berdasarkan politik (politically stratified), bila terdapat pemerintahan sosial berdasarkan otoritas, genesi, kehormatan, dan gelar, serta bila terdapat orang yang mengatur (the rulers) dan yang diatur (the ruled), dan (c) stratifikasi berdasarkan pekerjaan (occupationally stratified), jika masyarakat terdiferensiasi ke dalam berbagai pekerjaan dan beberapa di antara pekerjaan itu lebih tinggi statusnya dibandingkan yang lain.

Untuk konteks masyarakat pesisir, stratifikasi merupakan aspek yang penting dipelajari. Dengan mempelajari stratifikasi, akan ditemukan mana kelompok superior dan mana kelompok inferior, baik dalam konteks ekonomi maupun politik. Hal tersebut tentunya semakin memudahkan kita untuk memahami berbagai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat pesisir tersebut.

Namun, jelas bahwa bentuk stratifikasi masyarakat pesisir di Indonesia sangatlah beragam. Masyarakat yang kian berkembang akan semakin terstratifikasi. Sebaliknya, masyarakat yang masih tradisional dengan semua nelayan masih menggunakan perahu dayung tanpa motor stratifikasi sosialnya belum terlalu kompleks. Misalnya, posisi kelembagaan kerja usaha nelayan hanya terdiri dari dua, yaitu pemilik yang sekaligus menjadi juru mudi, dan satu atau dua orang ABK. Tentu ketika masyarakat sudah mulai berkembang dengan modernisasi perikanan, jumlah ABK bertambah dari dua orang menjadi 15 orang, umpamanya. Kelima belas orang itu
memiliki posisi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi juru mudi, motoris, juru masak, juru arus, juru selay, dan lain sebagainya. Lebih detail lagi Kusnadi (2000) mengklasifikasikan spesialisasi pekerjaan dalam perahu seleret sebagai berikut:

1) *jhuragan* adalah *pandhiga* yang bertanggungjawab atas kegiatan operasi perahu.
2) *Kel-bekel* adalah wakil *jhuragan* yang bertugas membantu *jhuragan*.
3) *Madhara pra'o* adalah *pandhiga* yang bertugas menjaga dan memelihara perahu.
4) *Tokang jaga'an* adalah *pandhiga* yang bertugas mengontak *pandhiga* *pandhiga* lain untuk bekerja.
5) *Tokang jaga mesin* adalah *pandhiga* yang bertugas merawat dan menghidupkan mesin untuk melajukan perahu.
6) *Tokang pancer* atau kemudi adalah *pandhiga* yang bertugas mengatur arah perjalanan perahu dan dilakukan oleh tiga orang.
7) *Tokang lampu* adalah *pandhiga* yang bertugas merawat, memompa tabung lampu, serta menghidupkan dan meletakkannya di tempat yang tersedia (*anjhang*).
8) *Tokang ngoras aeng* adalah *pandhiga* yang bertugas membuang air ke laut.
9) *Tokang nyobeng* adalah *pandhiga* yang bertugas menurunkan lampu ke laut sambil berenang dan mengatur posisi lampu agar dapat mengumpulkan ikan.
10) *Tokang ngereng* adalah *pandhiga* yang bertugas membuang timah ketika menabrak payang bagian depan dan mengatur perlengkapan timah tersebut.
11) *Tokang nggorit* adalah *pandhiga* yang bertugas menata posisi payang sebagaimana mestinya setelah dipakai.
12) Tokang du'um adalah pandhiga yang bertugas membagi hasil tangkapan.

Seiring modernisasi, akan terjadi diferensiasi sosial yang tampak pada semakin bertambahnya jumlah posisi sosial atau jenis pekerjaan. Bersamaan dengan itu, terjadi pula perubahan stratifikasi karena sejumlah posisi sosial tersebut tidaklah bersifat horizontal melainkan vertikal atau berjenjang. Ukuran penjenjangan tersebut bervariasi, bisa dengan ukuran ekonomi, prestise, atau kekuasaan.

Untuk mempelajari stratifikasi sosial suatu masyarakat, setidaknya ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan (Zanden 1990), yaitu:


**Sosiologi Masyarakat Pesisir**

**Tabel 8. Stratifikasi Sosial Masyarakat Krapyak dalam Pandangan Nelayan.**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Lapisan</th>
<th>Jenis Pekerjaan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ATAS-ATAS (5,5&lt;6)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Pemilik Kapal</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Juragan Batik</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Dokter</td>
</tr>
<tr>
<td>ATAS-BAWAH (5&lt;5,5)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Nahkoda</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Pemilik usaha</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>pengasidan ikan</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Petani Pemilik</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Pemilik toko</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Pemilik mobil umum</td>
</tr>
<tr>
<td>MENENGAH-BAWAH (3&lt;4)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Pemilik perahu</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Pemilik tambak</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Juru mesin</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Pedagang ikan</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Pegawai KUD</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Pegawai TPI</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Pengurus HSNI</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Pengurus kapal</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Petani penyewa</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Bakul batik</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Pemilik warung</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Pemilik kios</td>
</tr>
<tr>
<td>13.</td>
<td>Lurah</td>
</tr>
<tr>
<td>14.</td>
<td>Guru SD</td>
</tr>
<tr>
<td>15.</td>
<td>ABRI</td>
</tr>
<tr>
<td>16.</td>
<td>Guru SMA</td>
</tr>
<tr>
<td>17.</td>
<td>Pemilik beacak</td>
</tr>
<tr>
<td>18.</td>
<td>Tukang sungging</td>
</tr>
<tr>
<td>MENENGAH-BAWAH (3&lt;4)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Juru arus</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Juru gidang</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Penjual ikan di pasar</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Pegawai kantor pabrik pengolahan ikan</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Mandor batik</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Pelayan took</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Pegawai kelurahan</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Pegawai kantor di kelurahan swasta</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Sopir angkot</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Pemilik sasak</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Tukang jahit</td>
</tr>
<tr>
<td>BAWAH-ATAS (2&lt;3)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Juru selam</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Buruh tambak</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Tukang kireng</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Buruh tani</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Buruh batik</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Penjual sayur</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Tukang becak</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Kenek angkutan umum</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Tukang cukur</td>
</tr>
<tr>
<td>BAWAH-BAWAH (1&lt;2)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Juru masak</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Pandega</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Buruh usaha pengolahan ikan</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Struktur Sosial Masyarakat Pesisir

Penulis pernah menggunakan pendekatan reputasional, dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel di atas. Tampak pada Tabel tersebut bahwa secara reputasional posisi pemilik kapal lebih tinggi daripada seorang lurah. Hal ini menunjukkan bahwa ternyata masyarakat pesisir yang diteliti penulis lebih mempertimbangkan aspek penguasaan kapital daripada kekuasaan dalam melihat posisi sosial seseorang.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis nelayan</th>
<th>Lapisan atas</th>
<th>Lapisan tengah</th>
<th>Lapisan bawah</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Nelayan teripang, lola dan sirip hiu</td>
<td>Pemilik perahu layar</td>
<td>Juragan</td>
<td>ABK</td>
</tr>
<tr>
<td>(Bajo Oelaba dan Papela)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nelayan bodi/tuna</td>
<td>Pemilik bodi</td>
<td>Juragan</td>
<td>ABK</td>
</tr>
<tr>
<td>(Bajo Papela)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Nelayan bodi /ikan dasar (P. Ndao)</td>
<td>Pemilik bodi</td>
<td>Pemilik Kapal</td>
<td>ABK</td>
</tr>
<tr>
<td>Nelayan Lampara</td>
<td>Pemilik lampara</td>
<td>Juragan</td>
<td>ABK</td>
</tr>
<tr>
<td>Nelayan bagan malam</td>
<td>Pemilik bagan</td>
<td>Juragan</td>
<td>ABK</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Kotak 2. Stratifkasi Nelayan di Rote Ndao.

Hasil di lapangan ditemukan bahwa struktur sosial nelayan di Rote Ndao terdapat struktur nelayan berdasarkan struktur ekonomi dan politik. Hal ini disebabkan setiap karakteristik dan jenis nelayan satu dan lainnya berbeda dan juga terjadi pembedaan ini berdasarkan dari hasil komoditas yang ditangkap oleh nelayan. Pembagian tiga lapisan struktur nelayan, yaitu lapisan atas, menengah dan bawah, berdasarkan atas kekuasaan dalam menentukan posisi tawar bagi hasil. Lapisan atas adalah pemilik modal, lapisan menengah adalah orang yang dipercaya menangani perahu dan menentukan hasil produksi oleh bos. Lapisan menengah mempunyai dua bagian dalam bagi hasil, sedangkan lapisan bawah adalah ABK yang menjual jasanya untuk bos.

Pembagian tiga lapisan struktur nelayan, yaitu lapisan atas, menengah dan bawah, berdasarkan atas kekuasaan dalam menentukan posisi tawar bagi hasil. Lapisan atas adalah pemilik modal, lapisan menengah adalah orang yang dipercaya menangani perahu dan menentukan hasil produksi oleh bos. Lapisan menengah mempunyai dua bagian dalam bagi hasil, sedangkan lapisan bawah adalah ABK yang menjual jasanya untuk bos. Semakin berkembangnya masyarakat nelayan semakin terstruktur nelayan tersebut. Nelayan komersial adalah jenis nelayan berkembang. Di Rote Ndao nelayan komersil terdapat dua jenis, yaitu nelayan modern dengan menggunakan teknologi motorisasi dan nelayan tradisional yang menggunakan perahu layar untuk menangkap teripang, sirip hiu, dan lola di perbatasan.

Sumber: Satria, Suncko dan Sofyanto (2013).
BAB 4

DINAMIKA PERUBAHAN TEKNOLOGI PERIKANAN DAN FORMASI SOSIAL

Perubahan Teknologi Perikanan Sebagai Perubahan Kebudayaan

Perubahan teknologi perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, secara antropologis dipandang sebagai perubahan kebudayaan. Perubahan teknologi tersebut dapat berlangsung melalui adopsi dan inovasi.

Dalam inovasi, penemuan baru berupa alat oleh seorang individu dalam masyarakat sering disebut discovery. Apabila penemuan baru tersebut diakui dan diterima oleh masyarakat, penemuan baru tersebut dinamakan invention.¹ Antara discovery dan invention sering butuh waktu yang lama. Karena bagaimana pun masyarakat ingin memastikan apakah temuan teknologi baru tersebut akan benarbenar bermanfaat ataukah tidak. Bagi masyarakat pesisir, menerima suatu temuan mesti didasarkan pada bukti empiris. Artinya, apakah sudah ada orang yang pernah mencoba; apakah percobaan tersebut berhasil ataukah tidak? Dalam konteks masyarakat pesisir, kecepatan perubahan antara dua proses itu sangat bergantung pada tingkat risiko yang akan diterima bagi orang

¹ Pemikiran ini merujuk Ralph Linton dalam Koentjaraningrat, op.cit., hlm. 109.
yang hendak menggunakan teknologi baru tersebut. Masyarakat pesisir yang berkatergori peasant umumnya proses perubahan dari discovery menjadi invention membutuhkan waktu yang lebih lama seiring dengan karakteristiknya yang enggan ambil risiko dan safety first itu.

Menurut Koentjaraningrat (1990), penemuan baru dalam masyarakat pesisir didorong oleh kreativitas yang tumbuh karena:

(a) Kesadaran para individu akan adanya kekurangan-kekurangan dalam kebudayaan mereka;

(b) Adanya kesadaran akan pentingnya mutu keahlian yang bersangkutan, sehingga seseorang yang telah ahli dalam suatu bidang akan terus meningkatkan keahliannya;

(c) Adanya sistem perangsang dalam masyarakat yang mendorong mutu, seperti kehormatan, kedudukan, dan harta;

(d) Adanya krisis dalam masyarakat, yang berarti bahwa dalam masyarakat itu ada sejumlah orang yang menentang keadaan karena mereka sadar akan kekurangan-kekurangan yang ada dalam masyarakat itu serta merasa tidak puas dengan keadaan itu.


² lihat Perubahan Sosial Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Ratu (2002)
serupa juga terjadi di Bima, yakni nelayan Bugis memperkenalkan alat tangkap bagan kepada nelayan Waworada.

**Modernisasi Perikanan**

Urgensi modernisasi perikanan melalui perbaikan teknologi atau alat tangkap untuk peningkatan produksi dapat dipahami. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa kita masih *under capacity* untuk memanfaatkan potensi perikanan baik budi daya maupun tangkapan, lebih-lebih untuk penangkapan di perairan ZEEI.

Harus diakui bahwa pada akhirnya kapal-kapal asinglah yang mendominasi kegiatan penangkapan di perairan ZEEI, yang memang sesuai dengan hukum internasional bahwa kapal asing memang diperkenankan beroperasi kalau kita tidak mampu memanfaatkan potensi laut di situ.

Namun, harus dicatat bahwa izin bagi kapal asing dikeluarkan setelah adanya perjanjian bilateral atau multilateral dengan negara yang dijadikan bendera. Izin tersebut disertai dengan ketentuan kuota ikan yang boleh ditangkap serta *fee* yang harus dibayar. Namun, ternyata praktik pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh kapal asing justru marak yang berarti pelanggaran terhadap hukum internasional, sehingga perlu penegakan hukum bagi kapal asing, termasuk bagi para pengusaha Indonesia yang memfasilitasi terjadinya praktik tersebut.

Dengan melihat potensi yang ada, termasuk di wilayah perairan pesisir luar Jawa, upaya peningkatan teknologi atau armada penangkapan memang merupakan suatu keharusan. Namun, upaya pengembangan kapasitas penangkapan tersebut mesti mempertimbangkan beberapa hal, mengingat perubahan teknologi akan memengaruhi perubahan sosial.

<table>
<thead>
<tr>
<th>Jenis Alat Tangkap</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Trawl (Jaring tanik)</td>
<td>Jaring ini diperkenalkan di Indonesia oleh orang Jepang sebelum perang dunia kedua.</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaring Maruami</td>
<td>Jaring ini diperkenalkan pertama kali oleh para nelayan dari Kepulauan Fiji yang membawa KM. Senirosi dan KM. Senileba ke air tembaga pada Tahun 1952.</td>
</tr>
<tr>
<td>Tuna Longline</td>
<td>Percobaan penangkapan tuna dengan pancing rawai atau long line dilakukan pada Tahun 1956-1958.</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaring insang (gillnet)</td>
<td>Semula jaring insang yang dipakai di Indonesia terbuat dari benang lawe yang disamak secara tradisional. Sejak Tahun 1963 diperkenalkan jaring insang dari benang sintesis.</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaring lingkar (purse seine)</td>
<td>Purse seine berkembang dengan pesat sejak Tahun 1964.</td>
</tr>
<tr>
<td>Terumbu Karang Buatan (TKB)</td>
<td>Mulai dilakukan pada Tahun 1985 oleh Pemda DKI dengan menenggelamkan 100.000 becak dan lebih dari 200 ex bus/truck di perairan Teluk Jakarta. Pada waktu itu TKB masih dikenal dengan sebutan runpon.</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Dalam kegiatan penangkapan, modernisasi mulai berkembang di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda. Pada waktu itu dilakukan
Dinamika Perubahan Teknologi Perikanan dan Formasi Sosial


<table>
<thead>
<tr>
<th>Kotak 3. Modernisasi alat tangkap di Nelayan Bajo Wakatobi</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sumber: Suncoko (2012).</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Road map perkembangan teknologi motorisasi penangkapan ikan konsumsi karang hidup di Wakatobi adalah sebagai berikut:

---

Tabel 11. Perkembangan teknologi dalam komunitas nelayan Bajo Wakatobi

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tahun</th>
<th>Perkembangan Teknologi</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1970</td>
<td>Mesin Kubota (diesel)</td>
<td>7 PK, untuk mesin Sope (perahu khas Suku Bajo) (4 GT).</td>
</tr>
<tr>
<td>1972</td>
<td>Mesin Kubota (diesel)</td>
<td>8 PK, untuk mesin Sope (6 GT).</td>
</tr>
<tr>
<td>Dekade 1970-an akhir</td>
<td>Johnson (bensin)</td>
<td>8, 12, 15, 25, 40 PK.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Pada dekade ini juga sudah ada katinting dari merk mesin Honda dan Kawasaki. Nelayan sudah mulai ramai menggunakan Johnson</td>
</tr>
<tr>
<td>Dekade 1990-an'</td>
<td>Yanmar (Jepang) (diesel)</td>
<td>Untuk bodi susun/batang (perahu kayu dengan ukuran lebih besar 3 x lipat dari sampan), hampir seluruh nelayan menggunakan bodi.</td>
</tr>
<tr>
<td>Dekade 2000-an</td>
<td>Dijandong (Cina) (diesel)</td>
<td>Untuk bodi susun/batang.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Suncoko (2012).

Begitu pula perubahan teknologi budi daya. Teknologi budi daya perairan bagaimana pun masih perlu terus dipacu untuk meningkatkan produktivitas guna peningkatan kesejahteraan para pembudi daya ikan. Hal ini seiring dengan transformasi masyarakat ke arah ciri industrial, yang kemampuan kontrolnya terhadap sumber daya semakin besar sehingga budidaya perikanan pun menjadi sangat penting.

Modernisasi perikanan melalui peningkatan kualitas alat tangkap pada umumnya didorong untuk meningkatkan produksi perikanan. Berbagai pengalaman menunjukkan hal demikian. Secara umum ada beberapa pengaruh positif dari kelangsungan modernisasi perikanan tersebut, antara lain:

1) Terjadinya peningkatan produksi perikanan;
2) Meningkatnya pendapatan nelayan;
3) Mendorong terciptanya lapangan kerja baru.

Namun, tidak dapat dimungkiri juga bahwa modernisasi perikanan juga seringkali menyebabkan berbagai permasalahan. Berbagai studi menunjukkan bahwa modernisasi perikanan menyebabkan ketimpangan antarnelayan karena kesempatan untuk memperoleh bantuan teknologi dan modal sering bias kepada segelintir nelayan, serta ketimpangan pendapatan antara nelayan buruh dengan pemilik kapal.\(^5\) Begitu pula modernisasi perikanan juga tak jarang menyebabkan terjadinya konflik nelayan.\(^6\)

**Konsep Formasi Sosial**


---


\(^6\) Satria (2001) *op. cit.*

melarang pengoperasian *trawl*. Contoh perubahan formasi sosial akibat perubahan teknologi dapat dilihat pada Tabel berikut.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Aspek</th>
<th>Cara Baru (modern)</th>
<th>Cara Lama (Tradisional)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Kekuatan Produksi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Alat Produksi</td>
<td><em>Trawl, Puurse seine</em></td>
<td>Cantrang dan Klitik</td>
</tr>
<tr>
<td>Tenaga Kerja</td>
<td>Buruh nelayan semi-bebas</td>
<td>Buruh nelayan bebas</td>
</tr>
<tr>
<td>Hubungan Produksi</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Ukuran dan unit produksi</td>
<td>Kelompok besar (7-10 orang)</td>
<td>Kelompok kecil (3-4 orang)</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>dan (16-20 orang)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Struktur</td>
<td>Hierarki</td>
<td>Egaliter</td>
</tr>
<tr>
<td>Sifat</td>
<td>Semi eksploitatif dan eksploitatif</td>
<td>Non-eksploitatif</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Akibat pelarangan pengoperasian *trawl*, maka terjadi pula perubahan teknologi penangkapan, yakni *purse seine* menjadi dominan. Formasi sosial yang tercipta berbeda. Hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut.

Namun, perubahan teknologi penangkapan tidak saja menimbulkan konflik antarcara produksi, melainkan juga ternyata menyebabkan timbulnya konflik internal cara produksi. Dalam formasi sosial yang baru di kasus Pekalongan, “kekalahan” nelayan tradisional terjadi taktala mereka melakukan adaptasi terhadap modernisasi dengan menjadi ABK kapal *trawl*, kapal *purseine*, dan seterusnya. “Kekalahan” mereka tidak lagi dalam pertarungan antarcara produksi, melainkan dalam hubungan produksi, dengan memasuki cara produksi baru yang lebih modern. Mereka harus
berhadapan dengan hubungan produksi yang sama sekali berbeda dengan hubungan produksi pada cara produksi tradisional. Hubungan produksi pada cara produksi baru bersifat hierarkis dengan spesialisasi pekerjaan yang semakin tinggi.


<table>
<thead>
<tr>
<th>Kekuatan produksi</th>
<th>Cara Baru</th>
<th>Cara Lama</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Jenis alat produksi</td>
<td>Purse seine</td>
<td>Sepe (mesin deduk)</td>
</tr>
<tr>
<td>Sifat alat produksi</td>
<td>Modern</td>
<td>Semi-modern</td>
</tr>
<tr>
<td>Tenaga Kerja</td>
<td>Buruh permanen</td>
<td>Buruh semi permanen</td>
</tr>
<tr>
<td>Ukuran unit produksi</td>
<td>Kelompok besar (16-20 orang)</td>
<td>Kelompok kecil (4-6 orang)</td>
</tr>
<tr>
<td>Struktur</td>
<td>Hierarki</td>
<td>Semi Hierarki</td>
</tr>
<tr>
<td>Sifat</td>
<td>Eksplotatif dan semi eksplotatif</td>
<td>Semi eksplotatif</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Dinamika Perubahan Teknologi Perikanan dan Formasi Sosial

kepentingan selaku pimpinan HNSI dengan kepentingan pemilik kapal. Di beberapa daerah sudah mulai berkembang organisasi nelayan non-HNSI, dan ini merupakan kecenderungan yang positif bagi perjuangan membela buruh nelayan.

Tabel 14. Lokasi Kontradiktif dalam Hubungan Kelas

<table>
<thead>
<tr>
<th>No</th>
<th>Proses hubungan kelas</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Borjuis</td>
</tr>
<tr>
<td>2a.</td>
<td>Kapitalis tradisional</td>
</tr>
<tr>
<td>2b.</td>
<td>Eksekutif tinggi</td>
</tr>
<tr>
<td>2c.</td>
<td>Manajer tinggi</td>
</tr>
<tr>
<td>2d.</td>
<td>Manajer menengah</td>
</tr>
<tr>
<td>2e.</td>
<td>Teknokrat</td>
</tr>
<tr>
<td>2f.</td>
<td>Mandor</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Majikan kecil</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Petty borjuis</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Pekerja semi-otonom</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Proletar</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Wright (1982).

Keterangan:
+ : kontrol sepenuhnya
gural : kontrol lemah
- : tidak ada kontrol
minimal : kontrol residual

Lebih jauh, analisis formasi sosial secara lebih detail, khususnya untuk masyarakat yang sudah memiliki usaha-usaha industrial, dapat menggunakan kerangka Wright (1982). Wright juga menggunakan analisis formasi sosial untuk melihat gejala masyarakat transisional. Masyarakat transisional yang dimaksud adalah masyarakat yang
memiliki keragaman cara produksi yang cukup tinggi, dari borjuis kecil hingga borjuis besar. Kerangka Wright tampak lebih realistis dan lengkap karena juga mempertimbangkan posisi-posisi sosial yang selama ini jarang dilihat, seperti posisi pekerja semi-otonom (guru, dokter, peneliti, dsb) dan borjuis kecil serta memerinci bagaimana tingkat kontrol setiap posisi baik dalam cara produksi borjuis besar maupun borjuis kecil sebagaimana ditunjukkan Tabel berikut:

**Pola Bagi Hasil**

Pola bagi hasil merupakan salah satu bagian penting dalam hubungan produksi usaha perikanan. Pada komunitas nelayan tradisional tertentu berlaku sistem bagi hasil yang tidak menggunakan uang sebagai alat ukur melainkan lebih menekankan pola bagi hasil tangkapannya. Sistem ini berlaku, misalnya, di Lamalera dengan mengikuti tata cara adat yang berlaku. Masyarakat Lamalera membedakan hasil tangkap ke dalam dua golongan, yaitu ikan besar (paus, lumba-lumba, hiu, dan pari) dan ikan kecil (tuna, cakalang, tongkol, penyu, dll).

Pembagian hasil tangkap untuk jenis ikan besar hanya dilakukan oleh orang tertentu dan biasanya adalah pemilik perahu (têna alep) yang bertugas mengatur pembagian porsi untuk masing-masing anggota sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada umumnya pembagian hasil untuk jenis ikan besar menggunakan tiga patokan dasar, yaitu bagian untuk tuan tanah (leffa tana alep), bagian untuk awak perahu (mêng alep) dan bagian untuk keluarga suku pemilik perahu. Cara pembagian untuk paus berbeda dengan ikan pari dan ikan-ikan lainnya.6

---


**Pola Bagi Hasil di Kirdowono**


---

Sosiologi Masyarakat Pesisir

Sebagai contoh, sebuah perahu kantong (bertpandega empat orang) untuk suatu pelayaran mendapat hasil Rp.40.000. Hasil tersebut terlebih dahulu dikurangi biaya perbekalan sebesar Rp.5.000. Sisanya, Rp.35.000 dibagi dalam tujuh bagian; tiga bagan juragan dan (4 x 1) bagen pandega. Hasilnya, juragan mendapat Rp.15.000 dan setiap pandega mendapat Rp.5.000. Khusus untuk juru mudi, ia masih mendapat bonus dari juragan sebesar 10% dari penerimaan juragan yaitu Rp.1.500.

Dalam sistem bagi hasil model telung bagen, juragan mendapatkan bagian sedikit lebih besar daripada yang diterima melalui model papat-enem, yaitu juragan menerima sekitar 42% dan pandega (biasanya berjumlah empat orang) menerima 52% dari hasil tangkapan. Namun, hal ini tidak dipermasalahkan oleh para pandega, karena mereka rata-rata menerima 14,5% dari seluruh hasil. Sementara itu, pada model papat-enem, bagian juragan “hanya” 40%, tetapi 60% jatah pandega harus dibagikan kepada 8 hingga 30 pandega. Penurunan angka 2% itu dapat dianggap sebagai pengorbanan juragan untuk menambah sedikit hasil bagi pandega.

Rumus Model Telung Bagen menurut Juwono (1998), yaitu:

\[ X = \frac{Y-Z}{3+n \text{ pandega}} \times 5 \]

Keterangan:
X = Hasil Juragan
Y = Hasil Penjualan
Z = Biaya Perbekalan
3 = Porsi Bagen Juragan

Sementara itu, dalam sistem bagi hasil di antara pandega terdapat dua model, yaitu undho usuk dan serang rata. Model undho usuk (bertingkat berjenjang) diterapkan pada perahu yang
mempunyai banyak pandega. Pada model ini penghasilan seorang pandega dapat berbeda satu dengan yang lain, bergantung pada statusnya. Pandega biasa mendapat satu porsi bagen yang dikenal dengan bagen awak atau penghasilan badan. Pandega pegawe mendapat satu porsi bagen awak ditambah bagen pegawe-nya; dan bagen pegawe ini jumlahnya berbeda-beda antara satu jabatan dengan jabatan lain.


**Tabel 15. Penerapan Aturan Bagi Hasil di Kirdowono**

<table>
<thead>
<tr>
<th>Tipe Perahu</th>
<th>Bagi Hasil</th>
<th>Juragan-Pandega</th>
<th>AntarPandega</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Gillnet</td>
<td>Telung Bageu</td>
<td>Serang rata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kantong</td>
<td>Telung Bageu</td>
<td>Serang rata</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pukat Pantai</td>
<td>Papat-enem</td>
<td>Undho usuk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pusreine Mini</td>
<td>Papat-enem</td>
<td>Undho usuk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Cantrang</td>
<td>Papat-enem</td>
<td>Undho usuk</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Gemplo</td>
<td>Papat-enem</td>
<td>Undho usuk</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

Pola Bagi Hasil di Pesisir-Situbondo

Proses produksi dalam kehidupan nelayan perahu *sleret* di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki melibatkan dua kelompok yaitu *orenga* (pemilik perahu) dan *pandhiga* (pihak yang mengoperasikan perahu). Dalam proses tersebut terdapat sistem bagi hasil, yaitu sistem yang mengatur pembagian hasil tangkapan antara *orenga* dan *pandhiga* berdasarkan norma-norma yang berlaku (Kusnadi 2000).

Di Desa Pesisir berlaku dua sistem bagi hasil perahu sleret: sistem bagi tiga (*telon*) dan sistem bagi dua (*maron*). Sistem bagi tiga yang dimaksud adalah hasil tangkapan dibagi menjadi tiga bagian, dengan peruntukan satu bagian untuk *orenga* dan dua bagian untuk *pandhiga*; sedangkan pada sistem bagi dua, hasil tangkapan dibagi dua bagian dengan peruntukan satu bagian untuk *orenga* dan satu bagian lainnya untuk *pandhiga*. Namun, sistem yang umumnya digunakan oleh nelayan Desa Pesisir adalah sistem bagi tiga (*telon*).

Perbedaan sistem bagi tiga dengan sistem bagi dua terletak dalam penanggungan biaya operasi dan biaya perbaikan. Pada sistem bagi tiga, bagian yang diterima *orenga* merupakan penghasilan bersih tanpa harus mengeluarkan lagi biaya perbaikan kerusakan, peralatan tangkap, dan kebutuhan bahan bakar.

Kebutuhan itu diambil dari dua pertiga bagian yang menjadi bagian *pandhiga*. Di sisi lain, sistem bagi dua membebankan biayabiaya tersebut kepada *orenga*. Bagian yang diterima oleh *Pandhiga* merupakan pendapatan bersih. Pembagian hasil (*nyancang*) dilakukan oleh nelayan sebelum turun ke darat, dan bentuknya tidak berupa uang melainkan ikan.

Pembagian hasil untuk *pandhiga* memiliki sistem tersendiri. Bagian yang diterima oleh masing-masing *pandhiga* disebut sara’an.

---

*8 Kasus ini bersumber dari Kusnadi, *op.cit.*
Masing-masing pandhiga mendapatkan nilai sara’an yang berbeda-beda, bergantung pada spesialisasi pekerjaannya. Spesialisasi pekerjaan itu menunjukkan tanggung jawab dan berat atau ringannya pekerjaan tersebut. Nilai sara’an untuk masing-masing spesialisasi pekerjaan dalam mengoperasikan perahu sleret dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 16. Pembagian Kerja dan Perolehan Hasil

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Spesialisasi</th>
<th>Jumlah Pandhiga</th>
<th>Jumlah Sara’an</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>Jhuragan</td>
<td>1</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>Kel-bekel</td>
<td>1</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>Madar’ prao</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>Tokang Jaga’an</td>
<td>2</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>Tokang Jaga Mesin</td>
<td>4</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>Tokang Pancer</td>
<td>3</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>Tokang lampu</td>
<td>6</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>Tokang Ngoras aeng</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>Tokang Nyobeng</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>10.</td>
<td>Tokang Ngereng</td>
<td>4</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>11.</td>
<td>Tukang Nggorit</td>
<td>7</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>12.</td>
<td>Tokang Du’um</td>
<td>1</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>Jumlah</td>
<td></td>
<td>34'</td>
<td>45</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Sumber: Kusnadi (2000).

3. Pola Bagi Hasil di Pekaiongan⁹

Proses pembagian hasil perikanan tangkapan pada nelayan purse seine besar Kodya Pekalongan memiliki pola yang sudah ditentukan secara tertulis. Sistem pembagian hasil ini terlebih dahulu disepakati oleh nelayan pemilik kapal purse seine dengan nelayan bukan pemilik kapal (ABK) yang akan bekerja pada kapal miliknya.

Setiap kapal *purse seine* besar umumnya memiliki anak buah kapal (ABP) yang terdiri atas nahkoda (1 orang), wakil nahkoda (1 orang), kempitan (1 orang), motoris (2 orang), pelopor (1 orang), juru arus (2 orang) dan juru *gidang* (2 orang) yang masing-masing memiliki perannya sendiri-sendiri.

Atribut-atribut dari pola bagi hasil pada nelayan *purse seine* besar tersebut terdiri atas: pertama, *raman* bersih yaitu penerimaan hasil penjualan lelang ikan dari TPI setelah dipotong 3% dan sewa basket; kedua, *lawuhan* den bonus; ketiga, perbekalan yang terdiri dari kebutuhan bahan bakar seperti oli, solar, dan minyak tanah, kebutuhan pengawetan ikan berupa es dan garam, kebutuhan bahan pangan ABK selama penangkapan ikan di laut, biaya bongkar muat es ke kapal, uang transpor ABK dan biaya bongkar ikan di TPI, biaya suku cadang yang dibawa ke laut, ongkos perbaikan jarring, dan biaya perizinan; keempat, penyusutan jarring; kelima, bagian pihak kesatu (nelayan pemilik); dan keenam, bagian pihak kedua (nelayan ABK). Besarnya masing-masing bagian tersebut dapat dilihat dalam tabel di samping ini.

Tabel 17. Sistem Bagi Hasil Pada Perikanan Tangkap *Purse Seine*
Besaran Kodya Pekalongan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Atribut Bagi Hasil</th>
<th>Besarnya</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Raman bersih</td>
<td>= Rp.A</td>
</tr>
<tr>
<td>Lawuhan dan bonus</td>
<td>= 12% X A</td>
</tr>
<tr>
<td>Sisa 1 (A-B)</td>
<td>= Rp.B</td>
</tr>
<tr>
<td>Perbekalan</td>
<td>= Rp.C</td>
</tr>
<tr>
<td>Sisa 2 (C-D)</td>
<td>= Rp.D</td>
</tr>
<tr>
<td>Penyusutan Jaring</td>
<td>= 30% X E</td>
</tr>
<tr>
<td>Sisa (E-F)</td>
<td>= Rp.E</td>
</tr>
<tr>
<td>Bagian Pihak Kesatu</td>
<td>= 50% X G X F</td>
</tr>
<tr>
<td>Bagian Pihak Kedua</td>
<td>= 50% X G X B</td>
</tr>
</tbody>
</table>


73
Dinamika Perubahan Teknologi Perikanan dan Formasi Sosial

Sementara itu, besarnya biaya untuk lawuhan dan bonus masing-masing ABK memiliki persentase yang berbeda sesuai dengan peran yang diembannya. Perbedaan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 18. Pembagian Lawuhan dan Bonus ABK

<table>
<thead>
<tr>
<th>Atribut</th>
<th>Besarnya</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lawuhan</td>
<td>4,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Nahkoda</td>
<td>4,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>Wakil Nahkoda</td>
<td>0,5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Kempitan</td>
<td>0,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>Motoris (2 orang)</td>
<td>1,0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Pelapor</td>
<td>0,25%</td>
</tr>
<tr>
<td>Juru Arus (2 orang)</td>
<td>0,75%</td>
</tr>
<tr>
<td>Juru Gidang (2 orang)</td>
<td>0,75%</td>
</tr>
<tr>
<td>Lain-lain</td>
<td>0,5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>


Kesepakatan pola bagi hasil antara nelayan pemilik dengan nelayan bukan pemilik pada nelayan purse seine akan batal dengan sendirinya dan dibuat kesepakatan lagi apabila terdapat hal-hal berikut: 1. raman bersih kurang dari perbekalan, maka kekurangannya dibebankan pada perbekalan berikutnya dan pihak kesatu wajib memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); 2. raman bersih sama dengan perbekalan, maka pihak kesatu wajib memberikan pinjaman kepada pihak kedua sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah); 3. raman bersih sampai dengan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah dipotong perbekalan maka sisanya dibagi dua: 50% (lima puluh persen) untuk pihak kesatu dan 50% (lima puluh persen) untuk pihak kedua; dan 4. apabila bagian yang diterima pihak kedua seperti dimaksud di
atas kurang dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), maka pihak kesatu masih wajib memberikan pinjaman sehingga jumlah yang diterima pihak kedua mencapai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

**Pola Bagi Hasil di Rote Ndao**

Kajian penelitian tentang bagi hasil nelayan di Rote Ndao sangat bervariasi berdasar tipologi nelayan dan jenis komoditas tangkapnya. Terdapat tiga pola bagi hasil nelayan yaitu: nelayan lampara, nelayan tuna dan nelayan lintas batas untuk kategori moditas teripang, sirip hiu maupun lola.

Kotak 4. Bagi Hasil Nelayan Lampara atau Bagan (komoditas ikan halus)

Papalele (pengepul) ikan yang memberikan modal kepada nelayan menentukan pola bagi hasil di nelayan lampara siang atau bagan malam. Terdapat pola bagi hasil antara nelayan lampara siang dengan bagan malam. Modal tersebut adalah bahan bakar minyak (bbm) dan bekal logistik untuk melaut. Sistem pengembalian pembayaran hutang bbm dan logistik dilakukan dengan cara memotong harga penjualan dari nelayan yang berhutang. Papalele membeli ikan kepada nelayan dengan harga standar dari papalele lainnya tetapi meperoleh jumlah ikan yang banyak dibandingkan apabila membeli kepada nelayan tanpa hutang, sehingga menyebabkan keuntungan papalele menjadi dua kali lipat. Ilustrasi ikatan ABK-Juragan-Pemilik Kapal terlihat pada skema di bawah:

![Skema Ikatan Nelayan Lampara/Bagan](image-url)
Temuan hasil pola bagi hasil pada nelayan lampara siang di Komunitas Bajo Oenggae, Pantai Baru, Rote Ndao terdapat aliran pinjaman yang ditandai dengan garis panah hitam dan aliran ikan ditandai dengan garis panah merah. *Papalele* tidak hanya berlaku sebagai pembeli saja, akan tetapi sebagai pemberi pinjaman BBM terhadap ABK nya.

Sebagai contoh: ikan tongkol, dengan harga dan jumlah yang sama, misalnya tiga ekor tongkol harganya Rp.20.000, maka *papalele* tersebut akan mengambil 4 atau 5 ekor dan dibeli dengan harga yang sama. *Papalele* mempunyai *power* dalam memberikan modal dan pinjaman bbm dan logistik kepada nelayan *lampara*. Pengembalian pinjaman dengan cara diangsur sampai lunas.

Berbeda dengan studi kasus nelayan *bagan malam* di Desa Batutua, Rote Ndao, sistem pinjaman perongkasan dan perbekalan biasanya mengambil dari yang punya kios yang merupakan *patron* untuk dirinya. Pengembalian hutang perongkasan akan dibayar secara langsung melalui pemotongan ikan yang diambil. Kios disini berperan sebagai pemberi pinjaman perongkasan dan juga menjadi *papalele*. Kasus di Batutua cukup berbeda dan menarik, di sini kios tidak serta merta mengambil seluruh hasil kepada dirinya, tetapi membebaskan nelayan menjual kepada *papalele* lainnya.

Secara garis besar ragam ikatan patron-klien yang ada di komoditas ikan halus nelayan *lampara siang* dan *bagan malam* lebih cenderung ke arah ikatan hutang antara majikan/bos sebagai pemilik kapal/modal logistik melalui sebagai debiturnya dengan ABK (nelayan) sebagai krediturnya. Antara keduaanya mempunyai peran timbal balik, akan tetapi ABK lebih cenderung dirugikan dalam hal pembagian hasil.
Sosiologi Masyarakat Pesisir

Lanjutan kotak 4

Skema Sistem Bagi Hasil Nelayan Lampara

Misalnya dapat 20 ember (1 ember = 150.000)

Hasil 3 juta minus ongkos (500.000)

2.500.000 dibagi 2 (untuk juragan dan pemilik 1,25 juta)

1.250.000 dibagi 10 ABK (untuk juragan dari pemilik 250.000)

10 ABK mendapat 1.000.000. Uang 1 juta dibagi 10. Jadi ABK menerima hanya 100.000

Skema Bagi Hasil Nelayan Lampara


77
Kotak 5. Nelayan Tuna (Bajo Papela)


Sumber: Satria, Suncoko dan Sofyanto (TNC-FEMA IBB, 2013)
Sosiologi Masyarakat Pesisir

Kotak 6. Nelayan Lintas Batas untuk Komoditas Teripang, Sirip Hiu, Lola


1. Beras 100-150 orang (7-9 orang).
2. Air 4 drum (1 drum Rp.10.000)
3. 5 kg Gula, Rp.10.000/kg
4. Kopi 30-60 bungkus (@cap tugu buaya, Rp.500/sachet)
5. Garam satu karung, Rp.50.000
6. The 2-3 bungkus (Rp.21.000)
7. Kayu api 1 pick up sekitar 3 Kubik, Rp.150.000
8. Rokok 1-2 slop, Surya 16, Rp.173.000 dan LA, > Rp.100.000 (pinjam ke kios).

---

Skema Bagi Hasil Nelayan Lintas Batas

---

79
Lanjutan kotak 6


BAB 5

KONFLIK-KONFLIK MASYARAKAT PESISIR


Persaingan dapat terjadi antara orang perorangan (rivalry) maupun antarkelompok dalam mencapai suatu keuntungan melalui segala aspek kehidupan. Dalam proses persaingan, setiap pihak berusaha untuk menarik perhatian publik dan menguasai opini publik tanpa melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat ancaman ataupun kekerasan. Persaingan yang dilakukan oleh orang perorangan atau antarkelompok melahirkan beberapa bentuk persaingan yaitu,
persaingan ekonomi, persaingan kedudukan dan peranan, dan persaingan ras (Soekanto 1995).

Jika disertai gejala-gejala ketidakpastian dan keraguan tentang seseorang dan adanya sikap tersembunyi atas gagasan dan budaya yang dimiliki, persaingan itu disebut dengan kontraversi. Sikap tersembunyi tersebut dapat pula bersumber dari rasa ketidaksenangan terhadap kepribadian seseorang yang dapat berkembang menjadi rasa benci dan curiga terhadap segala tingkah lakunya. Tapi, sikap ini tidak melihatkan indikasi pertentangan ataupun pertikaian di kedua belah pihak. Timbulnya kontraversi dalam hubungan dua pihak dapat terlihat dari adanya, antara lain, pendapat-pendapat negatif tentang rivalnya, dan bahkan bisa berkembang menjadi isu-isu yang tidak menyenangkan di lingkungan tersebut.

Tahapan selanjutnya disebut konflik apabila kontraversi yang terjadi menciptakan ketegangan dalam hubungan kedua belah pihak karena dikuasai oleh rasa marah yang berlebihan. Situasi ini ditandai dengan tindakan menantang pihak lain, diikuti dengan ancaman dan tindakan kekerasan. Lebih ekstrem lagi, tindakan kekerasan ini diikuti oleh perasaan ingin melukai dan menghancurkan pihak lawan, sehingga tidak jarang terjadi perkelahian ataupun bentrokan antara kedua belah pihak.

Sebagai contoh, revolusi yang dilakukan oleh beberapa negara merupakan bentuk konflik yang terjadi antara dua pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kepentingan ini biasanya didasari oleh sistem nilai yang dianut sehingga untuk mentransformasikannya dipilih jalan yang bersifat revolusioner. Revolusi biasa ditandai dengan ancaman dan tindakan-tindakan kekerasan yang menghancurkan pihak lawan.

Menurut Robbins (1974), konflik dapat digolongkan menurut intensitasnya, yaitu:


2) Mempertanyakan hal-hal yang berbeda. Pihak-pihak tertentu mulai mempertanyakan hal-hal yang dianggap berbeda, tapi belum ada vonis bahwa pihak lain itu keliru.

3) Mengajukan serangan-serangan verbal. Perbedaan sudah diungkapkan secara terbuka dan sudah ada vonis agar pihak lain itu bersikap seperti yang diinginkan.

4) Mengajukan ancaman dan ultimatum. Di sini koersi verbal sudah muncul. Artinya ada suatu upaya agar pihak lain itu bersikap seperti dirinya.

5) Melakukan serangan fisik secara agresif. Bentuk pemaksakan sudah meningkatkan dalam bentuk koersi fisikal.

6) Melakukan upaya-upaya untuk merusak atau menghancurkan pihak lain.
Konflik-konflik Masyarakat Pesisir

Dalam kegiatan perikanan, khususnya penangkapan ikan, konflik merupakan gejala sosial yang sering ditemukan di berbagai wilayah perairan. Gejala konflik sosial tersebut dapat dilihat dari perspektif sumber daya, yaitu konflik antarnelayan sering terjadi dalam memerebutkan sumber daya ikan yang jumlahnya terbatas.


Pada kondisi lain, ada hal-hal yang sebenarnya belum diatur secara de jure, tetapi secara de facto telah diatur oleh masyarakat. Inilah yang sering disebut dengan aturan lokal, hak ulayat, dan lain sebagainya. Bisa saja konflik terjadi akibat upaya penangkapan ikan hanya didasarkan pada aturan de jure tanpa memperhatikan aturan secara de facto. Tentu masyarakat yang secara de facto merasa memiliki aturan. Jika dilanggar aturan tersebut, misalnya, oleh nelayan pendatang, masyarakat akan menentangnya. Akibatnya, terjadilah konflik.
Anatomi Konflik

Secara anatomis, sebenarnya konflik dalam masyarakat pesisir, khususnya nelayan, dapat dibedakan atas faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan Satria (2009a), terdapat tujuh macam konflik sebagai berikut:


2. **Konflik Kepemilikan Sumber daya**, yaitu konflik yang terjadi dalam isu “ikan milik siapa” atau “laut milik siapa”, yang terjadi antarkelas nelayan maupun interkelas nelayan. Atau bisa saja terjadi antara nelayan dengan pihak non nelayan, seperti anakata nelayan dan para pelaku usaha lain seperti pengusaha akuakultur, wisata bahari, pertambangan ataupun dengan pemerintah itu sendiri.

3. **Konflik Pengelolaan Sumber daya** merupakan konflik yang disebabkan oleh pelanggaran aturan pengelolaan baik yang terjadi antarnelayan maupun antara nelayan dengan pemerintah. Dalam konteks ini isu yang mencuat adalah siapa yang berhak mengelola sumber daya ikan maupun sumber daya laut.

4. **Konflik Cara Produksi atau Alat Tangkap**, merupakan konflik yang terjadi akibat perbedaan alat tangkap, baik sesama alat tangkap tradisional maupun antara alat tangkap tradisional dengan alat tangkap modern yang merugikan salah satu pihak.
5. **Konflik Lingkungan**, yaitu merupakan konflik yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh praktik salah satu pihak yang merugikan nelayan. Konflik ini kerap terjadi antara nelayan yang sudah sadar akan keramahan lingkungan dan nelayan yang masih mempraktekan aktivitas penangkapan perikanan yang tidak ramah lingkungan dan merusak ekosistem terumbu karang ataupun periaran lainnya.


Dengan melihat kategori konflik di atas, nampaknya penting untuk memetakan jenis konflik dengan kategori nelayan beserta contohnya sebagai berikut:


2. Konflik Kepemilikan Sumber Daya: Konflik antara nelayan dengan pengusaha wisata bahari yang ada di Lombok Utara, dimana masyarakat nelayan yang menggunakan jaring *muroami*
Sosiologi Masyarakat Pesisir

terusir dari daerah fishing ground yang telah berlangsung turun temurun sejak tahun 1950-1999.


7. Konflik Primordial: Konflik primordial nelayan Tomia di Kawasan TN Wakatobi, sangat tidak suka dengan tindakan Nelayan Bajo Lamanggau (Tomia), dikarenakan sifat
merusaknya yang menangkap ikan karang konsumsi hidup dengan potasium. Kerap terjadi Nelayan Tomia melaporkan tindakannya mereka terhadap BTN Wakatobi maupun yang berwajib setempat (Suncoko, 2012).


---

1 Contoh kasus ini bersumber dari pengalaman penulis pada saat melakukan studi lapang atas nama PKSPL IPB.
formasi sosial tradisional, hadirnya kapal trawl yang dibawa para nelayan dari Bagan Siapi-api mendorong nelayan lokal melakukan pemberontakan.


Kompas, 19 Juli 2002
Sebab itu, mereka masih tetap melakukan kegiatan penangkapan udang dan tengiri meskipun dengan tingkat produksi yang jauh dari sebelumnya. Ini merupakan contoh konflik lingkungan di pesisir.

**Resolusi Konflik**


1) *Coercion*, adalah proses akomodasi yang terjadi dengan melakukan paksaan oleh pihak yang memiliki kekuatan kepada pihak yang lemah

2) *Compromise*, masing-masing pihak mengurangi tuntutan agar mencapai suatu kesepakatan;

3) *Arbitration*, upaya untuk mencapai kesepakatan yang dilakukan oleh pihak ketiga karena kedua belah pihak tidak dapat mencapainya;

4) *Mediation*, pihak ketiga yang bersifat netral diundang oleh pihak-pihak yang bertikai untuk membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi. *Mediation* hampir menyerupai *arbitration*;

5) *Conciliation*, adalah suatu usaha yang mempertemukan keinginan-keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi
tercapainya suatu persetujuan bersama. Conciliation bersifat lebih lunak daripada coercion.

6) Tolerance, adalah suatu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang berbentuk formal;

7) Stalemate, pihak-pihak yang berselisih berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya karena kekuatan yang dimiliki masing-masing pihak seimbang;

8) Adjudication, penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan.
BAB 6
KEMISKINAN MASYARAKAT PESISIR


Kemiskinan Relatif dan Absolut

pemilik kapal long line yang markasnya di Muara Baru. Di sinilah mulai terasa perlunya memahami apa itu kemiskinan.


Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Tabel 20. Ringkasan Metode Identifikasi Kemiskinan

<table>
<thead>
<tr>
<th>Metode Identifikasi</th>
<th>Kriteria Kemiskinan</th>
<th>Sumber Data</th>
<th>Keterangan</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. Analisis atas Desa (Non-lokal) dengan unit per-kapita</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sayogyo</td>
<td>Tingkat Pengeluaran setara kilogram beras per-kapita per tahun:</td>
<td>Beragam sumber, terutama SUSENAS</td>
<td>Pengeluaran total untuk berbagai kebutuhan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kota</td>
<td>Desa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Miskin</td>
<td>&lt;480</td>
<td>&lt;320</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Miskin Sekali</td>
<td>&lt;360</td>
<td>&lt;240</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sangat Miskin</td>
<td>&lt;270</td>
<td>&lt;180</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Bank Dunia</td>
<td>Tingkat pendapatan per kapita per tahun:</td>
<td>Didekati dari PDRB</td>
<td>Indikator kemiskinan Bank Dunia menggunakan pendekatan pendapatan per harinya (US$ 1 - US$ 2) atau per bulan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Kota</td>
<td>Desa</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Miskin</td>
<td>&lt;US$ 75</td>
<td>&lt;US$ 50</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Indikator kesejahteraan menurut Bank Dunia: Tipologi kemiskinan keluarga</td>
<td>Pendapatan keluarga</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Keluarga miskin</td>
<td>&lt;US$ 1 per hari</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Keluarga hampir miskin</td>
<td>&lt;US$ 1,25 per hari</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Keluarga hampir tidak miskin</td>
<td>US$ 1,25 – &lt;US$ 2 per hari</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Keluarga tidak miskin</td>
<td>&gt;US$ 2 per hari</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Sumber: Muflikhati (2010).</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
Sosiologi Masyarakat Pesisir

3. BPS

Tingkat pengeluaran per kapita per hari untuk makanan:
Miskin <2100 kalori atau dikonversi dengan harga bahan makanan menjadi pengeluaran untuk bahan makanan per kapita per bulan (per Rp/1990).

Desa
Kota
Miskin
<20614
<13925

Ada dua indikator kemiskinan BPS yaitu: 1) Garis kemiskinan pangan dan bukan pangan (giris kemiskinan yang dibedakan antara perdesaan dan perkotaan) dan 2) Garis kemiskinan yang didasarkan kriteria rumah tangga miskin berdasar sasaran BLT (Bantuan Langsung Tunai), merupakan indikator yang digunakan pemerintah berdasarkan kriteria-kriteria rumah tangga miskin yang dikeluarkan oleh BPS (Muflikhati, 2010).

4. BKKBN

BKKBN menggolongkan keluarga berdasarkan tahap kesejahteraan keluarga dengan berbagai kriteria menjadi 5 kategori yaitu: keluarga pra sejahtera (pra-KS), keluarga sejahtera I (KS I), keluarga sejahtera II (KS II), keluarga sejahtera III (KS III) dan keluarga sejahtera III plus (KS III plus) (Muflikhati, 2010).

Menurut BKKBN, kategori keluarga KS I adalah: 1) makan dua kali sehari;
2) Anggota keluarga mempunyai pakan berbeda, bersekolah dan berpergian;
3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik,
4) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan;
5) Bila PUS ingin bantuan pergi ke sarana pelayanan kontraspeksi; dan
6) Semua anak umur 7-15 Tahun dalam keluarga bersekolah (Muflikhati, 2010).

BPS dalam mengkaji kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran per hari atau per bulan. Indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS jauh lebih rendah daripada indikator Bank Dunia.

Data SUSENAS

Dimensi ekonomi, sosial dan spiritual untuk menggambarkan kondisi keluarga yang miskin karena alasan ekonomi. Menurut indikator ini, keluarga dikatakan miskin jika tidak memenuhi enam kriteria yang mencerminkan kebutuhan dasar individu dalam keluarga, yaitu sandang, pangan dan papan.
Kemiskinan Masyarakat Pesisir

5. Sosial Metrik

Kesempatan keluarga menurut indikator sosial metrik lebih mengarah pada yang dirasakan oleh responden, dalam hal ini adalah suami dan atau istri dari keluarga contoh. Indikator sosial metrik terdiri dari 8 pertanyaan yang meliputi: 1) Kecukupan dalam hal ketersediaan pangan, 2) Keterjangkauan dalam menyekolahkan anak, 3) Keterjangkauan terhadap pelayanan kesehatan; 4) Kepemilikan peralatan rumah tangga; 5) Keterlibatan dalam aktivitas di masyarakat; 6) Penghargaan dari orang lain; 7) Kemampuan baca-tulis dan hitung; dan 8) Keberadaan kelompok rawan dalam keluarga (Muflikhati, 2010).

<table>
<thead>
<tr>
<th>Indikator</th>
<th>Informasi keluarga/ anggota keluarga.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Sosial Metrik</td>
<td>Dikenal/ digunakan oleh The Foundation for International Community Assistance (FINCA) untuk mengidentifikasi rumah tangga miskin.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

II. Analisis atas desa (Non-lokal) dengan unit Desa/Kelurahan/Kecamatan

<table>
<thead>
<tr>
<th>1. BANGDES (unit: desa)</th>
<th>Tingkat pendapatan perkapita rata-rata penduduk dihitung dengan setara beras miskin &lt;360 kg.</th>
<th>Data BANGDES</th>
<th>Pendapatan bersih</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>Beragam sumber atau pengumpulan data sendiri</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Agraria (unit: kecamatan, kriteria KBP dari tingkat kabupaten)</td>
<td>Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan minimum 9 buah pokok (KBP): Miskin sekali &lt;0.75 KBP Miskin 0.75-1.25 KBP Hampir Miskin 1.25-2.00 KBP Tidak Miskin &gt;2.00 KBP</td>
<td></td>
<td>Pendapatan perkapita dari produksi 15 sektor dengan harga lokal, disertai analisis faktor yang mempengaruhi kemiskinan.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Beragam sumber atau pengumpulan data sendiri</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Bappenas</td>
<td>Melihat persentase jumlah desa miskin per kecamatan: Miskin sekali &gt; 75% Miskin 50%-75% Hampir Miskin &lt;50%</td>
<td>Menggabungkan data BPS dan BANGDES</td>
<td>Dinyatakan dalam peta kemiskinan.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

III. Analisis tingkat desa (lokal) dengan unit per kapita/keluarga

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2. UUPKA</td>
<td>Indikator lokal yang berkaitan dengan</td>
<td>Berkaitan dengan</td>
</tr>
<tr>
<td>(Usaha</td>
<td>berbagai aspek kesejahteraan keluarga</td>
<td>program KB.</td>
</tr>
<tr>
<td>Peningkatan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Pendapatan</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Kelompok</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Akseptor</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>


Nilai Tukar Nelayan

Sejak tahun 1983 BPS telah mengembangkan Nilai Tukar Petani (NTP) sebagai salah satu proksi untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani. NTP merupakan angka perbandingan antara indeks harga yang diterima oleh petani (It) dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani (Ib). Perhitungan indeks harga yang digunakan didasarkan pada indeks harga Laspeyres, yaitu menggunakan kuantitas barang pada tahun dasar sebagai dasar perhitungan. NTP yang dikembangkan BPS mencakup lima komoditas, yaitu komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang mencakup perikanan laut dan darat.

Hal ini juga diperkuat oleh pengertian BPS (2014), Menurut BPS, bahwa nelayan di kategorikan sebagai petani.
Kotak 7. Pengertian Nilai Tukar Petani

1. Pengertian Umum :
   - NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib)

   ✤ Arti Angka NTP :
   - NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
   - NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

   ✤ Kegunaan dan Manfaat
   - Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
   - Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di perdesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan
   - NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
   - Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Sumber: BPS (2014).
Kemiskinan Masyarakat Pesisir

Sejak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), maka dikembangkan nilai tukar perikanan sendiri yang terdiri atas nilai tukar nelayan (NTN). Nilai Tukar (NTN) merupakan salah satu indikator kinerja utama (IKU) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dinilai mampu menggambarkan perkembangan penerimaan dan pengeluaran masyarakat secara bersamaan dalam suatu nilai indeks. Merujuk dari Permen KP No. 35 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Arsitektur Data Kelautan dan Perikanan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk menghasilkan data Nilai Tukar Nelayan (NTN) sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan yaitu:

1) Data harga yang diterima/pendapatan nelayan dari hasil produksi dan harga jual produk budidaya;
2) Data pengeluaran rumah tangga nelayan yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran biaya usaha perikanan.

Oleh karena itu, NTN berkaitan dengan kemampuan dan daya beli nelayan dalam membiayai hidup rumah tangganya. Apabila kenaikan pendapatan yang diterima akibat kenaikan harga produksi lebih besar dari kenaikan harga barang yang dibeli, maka hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan daya dan kemampuan nelayan atau kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan (Bappenas/JICA, Analisis Pencapaian Nilai Tukar Nelayan, 2014).

Sosiologi Masyarakat Pesisir

Angka NTN didapat dari perhitungan perbandingan Indeks harga yang diterima nelayan (It) dengan Indeks harga yang dibayar nelayan (Ib). Komponen penyusun untuk It dan Ib agar dapat dirinci, sehingga dapat dianalisis dan dapat dijadikan kebijakan untuk meningkatkan nilai NTN kedepannya. BPPSEKIP, Balitbang KP telah melakukan penghitungan angka NTN dengan berbagai metode dan dihasilkan angka yang berbeda-beda untuk setiap metodennya. BPS pun telah melakukan penghitungan NTN dengan berbagai metode seperti pada Balitbang KP. Metode-metode tersebut sudah dievaluasi satu-persatu, sehingga pada akhirnya BPS memakai metode terbaik untuk penghitungan NTN yaitu dengan formula Indeks Laspeyres yang dikembangkan. Adapun rumus NTN adalah sebagai berikut:

\[
NTN = \frac{I_t}{I_b}
\]

Dimana:
It: Indeks Harga yang diterima oleh nelayan
Ib: Indeks Harga yang dibeli oleh nelayan

Sedangkan Indeks Harga yang diterima nelayan (It) dan Indeks Harga yang dibayar oleh nelayan (Ib) dihitung dengan formula Indeks Laspeyres yang dikembangkan (Modified Laspeyres Index), yaitu:

\[
L = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{P_{t_i}}{P_{t-1}} \cdot \frac{Q_{t_i}}{Q_{t-1}}}{\sum_{i=1}^{n} P_{t_i} \cdot Q_{t_i}} \times 100
\]

Keterangan:

It = indeks yang diterima / indeks yang dibayar

Pti = harga barang i pada tahun t
Kemiskinan Masyarakat Pesisir

\[ P(t-1)I = \text{harga barang i pada tahun t-1} \]
\[ Qoi = \text{kuantitas barang i pada tahun dasar (tahun 0)} \]
\[ P(t-1)i Qoi = \text{nilai bobot barang ipada tahun t-1} \]
\[ Poi Qoi = \text{nilai bobot barang i pada tahun dasar} \]
\[ pyj = \text{harga barang konsumsi rumah tangga} \]
\[ qyj = \text{kuantitas barang konsumsi rumah tangga} \]

Sumber: Bappenas/JICA, Analisis Pencapaian Nilai Tukar Nelayan (NTN), 2014.


Gambar 2. Nilai Tukar Nelayan


Sumber: BPS, 2013

Hingga saat ini masih belum ditemukan pendekatan yang lebih pas untuk memantau perkembangan "kesejahteraan" secara periodik (bulanan) selain dengan NTN. Sejauh ini NTN adalah yang termudah dibandingkan dengan pengukuran lain. Akan tetapi, masih perlu diupayakan ketersediaan data tentang seberapa efektif intervensi program pembangunan terhadap kesejahteraan nelayan melalui berbagai program bantuan.

**Kemiskinan Kultural, Alamiah, dan Struktural**

Selanjutnya kategorisasi kemiskinan juga dapat dilakukan berdasarkan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan tersebut.
Ada dua aliran besar dalam konteks ini.

**Pertama**, adalah aliran modernisasi yang selalu menganggap bahwa persoalan kemiskinan disebabkan faktor internal masyarakat. Aliran ini menyatakan kemiskinan nelayan terjadi sebagai akibat dari faktor budaya (kemalasan), keterbatasan modal, dan teknologi, keterbatasan manajemen, dan kondisi sumber daya alam. Umumnya kemiskinan tipe ini disebut dengan kemiskinan kultural dan alamiah. Karena itu, aliran ini selalu sarat dengan proposal modernisasi nelayan, yaitu bahwa sudah sepatutnya nelayan mengubah budayanya, meningkatkan kapasitas teknologinya, dan memperbaiki sistem usahanya.


bawal putih di Muara Angke, Jakarta Utara sekitar Rp.15.000/kg. Pada hari yang sama, ikan yang sama dijual oleh pedagang perantara (restoran *seafood* di Muara Angke) kepada para konsumen akhir adalah sebesar Rp.50.000/kg.


Gambar 3. Sistem Rantai Tata Niaga yang menjebak Nelayan/ Petani Ikan dalam Kemiskinan

Sumber: Dahuri (2001).

Namun, jika kita berangkat dari masalah kemiskinan nelayan tentu orang pun akan bertanya, mungkin mengatasi kemiskinan nelayan secara otomatis akan meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan terhadap ekonomi nasional? Apakah nelayan-nelayan yang berskala kecil itu dapat menjadi pelaku utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan?
BAB 7
PENGELOLAAN SUMBER DAYA
PERIKANAN BERBASIS MASYARAKAT


Sebenarnya tuntutan pengelolaan sumber daya ikan sudah dimulai sejak zaman Belanda. Paling tidak ada tiga peraturan yang mencerminkan kepedulian pemerintah Hindia Belanda pengelolaan sumber daya ikan. Pertama, pada tahun 1914 pemerintah menerbitkan peraturan tentang mutiara, teripang, dan bunga karang dalam batas alur laut tidak lebih dari tiga mil laut. Kedua, pada tahun 1920 diterbitkan peraturan yang melarang pengangkapan ikan dengan obat bius, bahan beracun, atau bahan peledak, kecuali untuk
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat

Kepentingan penelitian dalam jangka waktu tertentu. *Ketiga*, pada tahun 1927, diterbitkan peraturan perburuan paus dalam batas alur laut tiga mil laut. Dalam peraturan ini ada perkecualian bagi nelayan Indonesia yang telah melakukan penangkapan paus secara turun-temurun.⁰¹


Selanjutnya, kini isu pengelolaan sumber daya perikanan mulai diperhatikan karena orang makin sadar bahwa sumber daya perikanan, apabila tidak dikelola dengan baik, akan terancam kelestariannya. Salah satu aspek penting dalam kajian sosial seputar pengelolaan sumber daya perikanan adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam proses pengelolaan tersebut, apakah pemerintah (*government based management*), masyarakat (*community based management*), ataukah kerja sama antarkeduanya (*Co-management*).

Pada bab ini, pertama-tama akan dipetakan secara teoretis, di mana posisi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya. Pada umumnya model-model pengelolaan sumber daya dikategorikan ke dalam dua kelompok. *Pertama*, model yang didasarkan pada tingkat pengendalian *stakeholder* atau pemangku kepentingan, sehingga dalam model tersebut terungkap siapa yang paling dominan dalam pengelolaan sumber daya: apakah pemerintah, masyarakat, ataukah

keduanya. Sementara itu, yang *kedua* merupakan model yang didasarkan pada *right*, khususnya *right* yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya. Kategori model yang kedua sangat penting sebagai penjelas kategori model pertama. Artinya, ketika berbicara tentang ko-manajemen, maka kita tidak serta-merta akan mengatakan cocok untuk konteks masyarakat pesisir kita, karena mesti diketahui terlebih dahulu ko-manajemen dalam konteks *right* yang bagaimana.

*Command and Control, CBM, dan Co-Management*

Salah satu pendekatan dalam mengklasifikasikan model pengelolaan sumber daya perikanan, adalah berdasarkan tingkat pengendalian *stakeholder*. Dalam pendekatan ini, Jentoft (1989) mengklasifikasikannya menjadi tiga, yakni *government (command and control), community based management, dan co-management.*

1. Pengelolaan oleh Pemerintah

   Model *command and control* merupakan model konvensional dengan pemerintah memegang seluruh kendali pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya dalam hak inisiatif maupun pengawasan melalui organisasi formal yang dimilikinya. Nelayan atau pelaku usaha perikanan tidak mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengelola sumber daya perikanan. Dengan demikian, proses pengelolaan sumber daya perikanan berlangsung secara sentralisit. Contoh penerapan model ini adalah di sebagian perikanan Denmark.

   Pengelolaan berpusat pada pemerintah didasarkan pada alasan bahwa ada fungsifungsi tertentu dalam pengelolaan sumber daya, yaitu fungsialokasi, fungsidistribusi, dan fungstabilisasi.² Fungsi alokasi melalui regulasi dimaksudkan untuk membagi sumber daya

   ² Nikijuluw (2001) *Rezim Pengelolaan Sumber daya Perikanan* (Jakarta: P3R)

1) Keterlambatan pemerintah dalam menegakkan aturan yang sudah ditetapkan;

2) Kesulitan penegakan hukum karena kekurangan personil dan fasilitas untuk melakukan pengawasan dan pengendalian;

3) Ketidaksesuaian antara peraturan yang dibuat pemerintah pusat dengan kenyataan di lapangan;

4) Munculnya berbagai peraturan yang saling bertentangan satu sama lain;

5) Tingginya biaya transaksi, khususnya dalam biaya sosialisasi, biaya pemantauan, biaya pelaporan, dan biaya kegiatan yang tidak diantisipasi sebelumnya;

6) Banyaknya wewenang yang tersebar di banyak instansi departemen sehingga sering menyebabkan masalah dalam koordinasi;

7) Ketidakakuratan data dan informasi yang didapatkan pemerintah menyebabkan ketidaktepatan keputusan yang diambil;

8) Kegagalan merumuskan keputusan manajemen dapat terjadi ketika pemerintah harus cepat mengatasi masalah-masalah yang muncul di lapangan.

³ *Loc. cit.*
2. Pengelolaan oleh Masyarakat

Kegagalan praktik pengelolaan sumber daya yang berpusat pada pemerintah tersebut mendorong munculnya kesadaran pentingnya community based management (CBM) atau pengelolaan berbasis pada masyarakat, yang merupakan kebalikan dari model command and control. Dalam CBM, pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh para nelayan atau pelaku usaha perikanan di suatu wilayah tertentu melalui organisasi yang sifatnya informal. Dalam model ini, partisipasi nelayan sangatlah tinggi dan mereka memiliki otonomi terhadap pengelolaan sumber daya perikanan tersebut. Efektivitas pengelolaan sumber daya dengan sistem CBM terlihat karena perencanannya bersifat bottom up dan menggunakan pendekatan pastisipatif, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan atas sumber daya (Satria dan Matsuda, 2004). Contoh yang paling mudah ditemukan di Indonesia adalah sistem sasi di Maluku.

Sasi, yang diterapkan kurang lebih sejak abad ke-17, memiliki arti penting dalam pengembangan masyarakat dan kelestarian ekologi pesisir. Ada tiga tujuan utama dari kelembagaan sasi (Zerner 1992), yaitu:

1) menjamin kesempatan yang sama kepada komunitas lokal dalam melakukan kegiatan perikanan di wilayah pesisir;
2) menjamin efektivitas pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah perairan pesisir secara berkelanjutan;
3) menjamin kesempatan kepada anggota komunitas untuk melestarikan nilai-nilai subsistensi maupun ekonomi dari wilayah perairan mereka.

Secara harfiah sasi berarti “larangan”. Hal ini berarti ada hak pengelolaan tertentu terhadap suatu wilayah perairan oleh suatu komunitas di sekitar wilayah perairan, sementara komunitas di luar wilayah tersebut dilarang melakukan kegiatan perikanan di wilayah
sasi diterapkan. Aturan main yang diterapkan juga tidak serta-merta melarang nelayan luar masuk ke wilayah perairan, melainkan juga kadang melarang komunitas pemegang hak sasi untuk beroperasi.

Paling tidak ada empat hal yang terkandung dalam kelembagaan sasi, yaitu: (1) penentuan waktu beroperasi, (2) peraturan penangkapan berdasarkan spesies, (3) pengaturan berdasarkan alat tangkap, dan (4) sanksi. Hal ini sudah dijelaskan dalam bagian sebelumnya.

Secara umum, model CBM mengandung beberapa unsur pokok (Ruddle dan Satria 2010), yaitu:
1) Batas Wilayah
   CBM memiliki batas wilayah baik yang bersifat fisik (muara sungai, pohon, gunung) maupun imaginer.
2) Aturan
   CBM memiliki aturan operasional terkait dengan apa yang boleh dan tidak boleh dalam pemanfaatan sumber daya perikanan
3) Hak
   CBM mengatur hak para nelayan untuk mengelola maupun memanfaatkan sumber daya.
4) Pemegang Otoritas
   CBM dikelola oleh lembaga/organisasi lokal yang umumnya tidak formal
5) Sanksi
   CBM mengatur sanksi bagi para pelanggar aturan yang umumnya berupa sanksi sosial dan ekonomi, dan kadang kala sanksi fisik
6) Pemantauan dan pengawasan
   CBM mengatur aktivitas pemantauan dan pengawasan untuk memastikan aturan main dapat dilaksanakan.
Sosiologi Masyarakat Pesisir

Ada beberapa keunggulan model CBM ini, antara lain:

1) Tingginya rasa kepemilikan masyarakat terhadap sumber daya sehingga mendorong mereka untuk bertanggung jawab melaksanakan aturan tersebut;

2) Aturan-aturan yang diciptakan sesuai dengan realitas yang sebenarnya baik secara sosial maupun ekologis sehingga aturan dapat diterima dan dijalankan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri;

3) Biaya transaksi rendah karena semua proses pengelolaan dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, khususnya dalam kegiatan pengawasan.


Pertama, mekanisme berlakunya hak ulayat laut yang sejak dulu berkembang dan saat ini tetap dijalankan, sebagaimana terlihat pada model sasi, seke, rompong. Artinya model CBM tersebut berbasis pada hak ulayat laut, yang menurut Wahyono et al. (2001), memiliki beberapa fenomena umum:

1) Setiap pengelolaan mempunyai organisasi sebagai penyelenggara atau pelaksana pengelolaan;
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat

2) Pada setiap sistem pengelolaan terdapat pihak-pihak yang memiliki wewenang sebagai unit sosial pemegang hak ulayat dalam masyarakat;

3) Aturan-aturan dalam pengelolaan yang pada intinya bersangkut paut dengan hal-hal yang dibolehkan dan dilarang dalam praktik hak ulayat laut;

4) Masa kewenangan diberlakukan atas waktu pelaksanaan hak ulayat laut.

Kedua, mekanisme reaktualisasi dan revitalisasi nilai-nilai lokal yang telah pudar dan kemudian dijadikan dasar dikembangkannya CBM. Mekanisme ini terlihat pada berkembangnya awig-awig di Lombok yang saat ini mulai dijalankan masyarakat dan diakui pemerintah.

Ketiga, mekanisme intervensi pihak luar untuk membuat model CBM baru yang bisa saja merupakan hasil pelajaran dari pengalaman model CBM melalui dua mekanisme di atas. Mekanisme ini ada yang dikembangkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan ada pula dilakukan pemerintah. Saat ini sering ditemukan berbagai proyek LSM atau pemerintah yang bertujuan untuk bersama-sama masyarakat menciptakan model CBM baru.

Di samping sejumlah keunggulan yang dimiliki, model CBM juga memiliki kelemahan sebagai berikut:

1) Kurang terakomodasikannya pertimbangan-pertimbangan ilmiah dalam pengelolaaan sumber daya, karena hampir seluruh proses CBM—khususnya yang berkembang melalui mekanisme hak ulayat dan mekanisme reaktualisasi - berdasar pada pengetahuan lokal (indigenous knowledge). Seperti dalam pengelolaan sumber daya, sangatlah penting data tentang stok ikan sebagai dasar untuk menyusun model pengelolaan.
Sosiologi Masyarakat Pesisir

2) Sering Model CBM dikembangkan atas dasar intervensi pihak luar yang kurang mengakar sehingga kurang dipatuhi masyarakat lokal. Masalah ini umumnya terjadi sebagai akibat besarnya keinginan pemerintah untuk mewujudkan model CBM sehingga sering bertumpu pada kekuatan organ pemerintah dan bukan pada tokoh informal.


1) Tidak mampu mengatasi masalah interkomunitas, padahal sumber daya ikan bermigrasi dan melampaui batas-batas wilayah dan tempat tinggal komunitas tertentu, sehingga konflik antarkomunitas yang berbeda sering terjadi;

2) Bersifat lokal sehingga masalah yang lebih besar seperti over-exploitation untuk ikan jenis tertentu tidak dapat dipecahkan melalui CBM di suatu lokasi;

3) Sulit mencapai skala ekonomi karena bersifat lokal dan hanya dianut oleh suatu masyarakat saja;

4) Tingginya biaya institusionalisasi, khususnya untuk proses edukasi, penyadaran, dan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlunya CBM, perumusan aturan CBM melalui pengembangan partisipasi masyarakat, serta untuk pembentukan organisasi CBM itu sendiri.
3. Ko-manajemen

Model ko-manajemen (co-management), yang akhir-akhir ini terus disosialisasikan. Model ini merupakan sintesis dari dua model ekstrem sebelumnya. Dalam model ini pemerintah dan masyarakat yang sering diwakili organisasi nelayan atau koperasi perikanan sama-sama terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya: mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Terdapat banyak definisi tentang co-management, antara lain, (Lim et.al., 1995):

1. a natural adaptation between the government and the local community in resources management (Acheson)
2. power sharing and responsibility-sharing through delegation of a portion on the planning process to group of fishermen (Rettig et.al)
3. sharing of management power and responsibility by the state and fishing community (Barkes & Kislaioğlu and Feeny)
4. Devolution of management responsibilities to the local level, giving importance to the participation of fisherfolk in management and environmental monitoring activities, and government support endorsing the formation of any community organization (FAO)
5. a dynamic relationship between the national government and the community sharing authority for fisheries management (Pemero)


Menurut Pomeroy dan Berkes (1997), dalam Nikijuluw (2002), ada sepuluh tingkatan ko-manajemen yang disusun berdasarkan rentang partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pemerintah, yaitu:

1) Masyarakat hanya memberikan informasi kepada pemerintah dan informasi tersebut digunakan sebagai bahan perumusan manajemen;

2) Masyarakat berkonsultasi dengan pemerintah;

3) Masyarakat dan pemerintah saling bekerja sama;

4) Masyarakat dan pemerintah saling berkomunikasi;

5) Masyarakat dan pemerintah saling bertukar informasi;

6) Masyarakat dan pemerintah saling memberi nasihat dan saran;

7) Masyarakat dan pemerintah melakukan kegiatan atau aksi bersama;

8) Masyarakat dan pemerintah bermitra;

9) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah;

10) Masyarakat lebih berperan dalam melakukan koordinasi antarlokasi atau antardaerah dan hal tersebut didukung oleh pemerintah.
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Masyarakat

Pendekatan Berbasis Right

Secara teoretis, ada dua bentuk regulasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan, yaitu open access dan controlled access regulation. Open access adalah regulasi yang membiarkan para nelayan untuk menangkap ikan kapan saja, di mana saja, berapa pun jumlahnya dan dengan alat apa saja, sehingga regulasi ini mirip dengan "hukum rimba" dan "pasar bebas". Secara empiris, regulasi ini menimbulkan dampak negatif yang dikenal dengan "tragedy of the common", baik berupa kerusakan sumber daya perikanan, maupun konflik antarnelayan.

Gagalnya regulasi tersebut mendorong munculnya bentuk regulasi lainnya, yakni controlled access regulation. Dalam regulasi ini, menurut Anderson (1995), paling tidak ada dua kategori, yakni (1) berdasarkan pembatasan input (input restriction) yang membatasi jumlah pelaku, jumlah dan jenis kapal, serta jenis alat tangkap, dan (2) berdasarkan pembatasan output (output restriction) yang membatasi berapa jumlah tangkapan bagi setiap pelaku berdasarkan kuota baik Individual Quota (IQ), Individual Transferable Quota (ITQ), dan seterusnya yang umumnya diterapkan di negara-negara maju.

Selama ini, pembatasan input merupakan instrumen kebijakan yang masih sering digunakan oleh negara-negara Asia dan negara berkembang lainnya. Salah satu formulasi dari pembatasan input adalah territorial use right yang menekankan penggunaan fishing right (hak untuk memanfaatkan sumber daya perikanan) dalam suatu wilayah tertentu dengan batas yurisdiksi yang jelas. Dalam sistem ini, hanya pemegang fishing right yang berhak melakukan kegiatan perikanan di suatu wilayah, sementara pihak yang tidak memiliki fishing right tidak diizinkan beroperasi di wilayah tersebut.
Selain diatur siapa yang berhak melakukan kegiatan perikanan, juga diatur kapan dan dengan alat apa kegiatan perikanan dilakukan. Sistem ini memang menjurus pada bentuk "pengavelingan" laut. Bentuk regulasi ini dianggap penting untuk menjaga kepentingan nelayan kecil yang hanya beroperasi di wilayah pantai pesisir dan kepentingan kelestarian sumber daya.


Dari beberapa macam pendekatan dan jenis (model) pendekatan pengelolaan sumber daya perikanan di atas, muncul pertanyaan: manakah yang paling efektif untuk digunakan? Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi membutuhkan jawaban yang barangkali secara tuntas sulit ditemukan dalam tulisan ini. Hal ini mengingat secara teoretis masih terus dikaji dan diperdebatkan karena memang model-model tersebut dilihat dari perspektif yang berbeda-beda. Sebagai contoh, para ekonom yang basis pemikirannya neo-klasik akan cenderung memilih model individual property right atau ITQ. Sementara itu, para sosolog dan antropolog cenderung memilih komanajemen atau CBM, dan para ahli biologi atau lingkungan akan memilih model yang mengarah kepada manajemen ekosistem. Selain itu, faktor wilayah juga perlu menjadi pertimbangan mengingat pada
prinsipnya model pengelolaan sumber daya perikanan tersebut bersifat site specific yang sulit digeneralisasi untuk setiap wilayah.

Hingga saat ini ITQ memang merupakan pendekatan atau model yang diterapkan di negara-negara maju. Model ITQ juga sering disebut sebagai model yang "modern", sehingga seolah-olah merupakan model yang patut ditiru untuk mengatasi problem sumber daya perikanan laut. Namun, baik secara teoretis maupun empiris telah terbukti bahwa ITQ memang mendatangkan keuntungan secara ekonomis. Namun, pada saat yang sama juga ITQ membawa sejumlah masalah secara sosial. Ini merupakan konsekuensi dari rumus "the fewer vessels the larger the share of the resource for each them within a given TAC".

Secara teoretis, ITQ memang merupakan pemecahan ekonomi terhadap problem sumber daya, yang bertolak dari kerusakan sumber daya seperti over fishing dianggap sebagai kegagalan pasar (market failure). ITQ dianggap akan dapat menjaga kelestarian sumber daya sekaligus meningkatkan efisiensi usaha penangkap. Akan tetapi, ada hal penting yang patut dikaji bagaimana pendekatan ITQ memahami karakter masyarakat (fishing community).

Dalam memahami karakter masyarakat nelayan paling tidak ada dua pendekatan yang sering digunakan (Jenfoft 2000). Pertama, adalah teori konsolidasi yang melihat masyarakat sebagai sistem yang interdependen (interdependent system), aspek peranan tidak diperhatikan dalam interaksi individu tapi antarperlaku individu tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Dalam sistem ini, tidak ada hak dan kewajiban yang mengatur interaksi. Contoh yang tepat untuk sistem ini adalah antrean bus: para calon penumpang berkumpul tapi satu sama lain tidak ada kepentingan, kecuali memiliki tujuan yang sama, yakni mendapatkan tempat duduk yang nyaman. Calon penumpang akan menganggap calon penumpang lain
Sosiologi Masyarakat Pesisir


Kedua, teori domino yang melihat masyarakat sebagai fungsional yang saling bergantung dan saling mendukung karena berbagai macam ikatan baik budaya, keturunan atau keluarga, maupun sejarah. Dengan demikian, antarnelayan tidaklah “berjarak”, melainkan merupakan suatu bentuk hubungan kolegial. Dalam konteks komunitas nelayan, hal ini ditunjukkan dengan adanya saling kerja sama, bukan persaingan, dalam pemanfaatan sumber daya. Kondisi masyarakat yang seperti inilah yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya berlangsung secara tepat baik secara ekonomi maupun sosial.

atas, model ko-manajemen dianggap tepat untuk mengakomodasi kepentingan partisipasi nelayan dalam proses pengelolaan sumber daya perikanan tersebut.

Akan tetapi, pengalaman di Norwegia seperti digambarkan Jenforst (2000) menunjukkan bahwa ternyata pada kenyataannya ko-manajemen juga tidak menjamin adanya peran nelayan dalam proses pengambilan keputusan. Karena itu, di Kanada ada organisasi nelayan yang mengusulkan adanya pendekatan baru yang mereka sebut "community based co-management" untuk mempertegas lagi bahwa nelayan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan sumber daya perikanan.

**Model Jepang: Fishery Right**

dan menangkap ikan di wilayahnya, sementara nelayan dari luar wilayah tersebut tidak diizinkan. Jadi, telah terjadi pengavelingan laut, dan menjerumus pada property right terhadap wilayah perairan. Tapi, jangan lupa bahwa ini dikeluarkan Rezim Feodal juga dalam skenario penarikan pajak dari para nelayan lokal tersebut. Pihak yang sebenarnya berkuasa terhadap pengavelingan laut tersebut bukannya nelayan, melainkan para tuan tanah yang berafiliasi ke pemerintah feodal.

Selanjutnya pada zaman Restorasi Meiji tahun 1868, hak-hak semacam soyu tersebut dihilangkan dan semuanya dikembalikan kepada pemerintah pusat yang baru (kaimen kanyu sengen). Hal ini terjadi pada tahun 1874. Namun, ternyata adanya kebijakan baru tersebut justru menimbulkan konflik antarnelayan di wilayah perairan, sehingga para nelayan menuntut dikembalikannya aturan main lama yang memang seolah-olah telah menjadi hak ulayat. Pada tahun 1875, pemerintah Meiji akhirnya memenuhi tuntutan para nelayan. Akan tetapi, hak-hak (Fishery Right) dialihkan dari tuan-tuan tanah ke gubernur yang selanjutnya diberikan kepada federasi koperasi atau asosiasi perikanan (fisheries cooperative association-FCA) untuk mengatur hak-hak tersebut demi kepentingan anggotanya. (Sato 1991; Hirasawa et al. 1991). Menurut Morisawa et al. (1991), apa yang dikembangkan pada era Meiji ini selanjutnya menjadi dasar bagi Undang-undang Perikanan Jepang pada tahun 1949. Selanjutnya, dalam UU perikanan yang baru tersebut terkandung prinsip-prinsip yang kuat untuk menghilangkan sisa-sisa feodalisme Rezim Edo. Prinsip tersebut, antara lain, memuat aturan: (a) bahwa fishery right hanya diberikan kepada nelayan atau pengusaha perikanan yang aktif, (b) penjualbelian hak (leasing arrangement) dilarang, dan (c) administrasi lokal yang menangani fishery right adalah FCA.
Fishery right sendiri berkembang sejalan, dengan perkembangan perundang-undangan. Berdasarkan UU Perikanan yang direvisi (1984) fishery right dapat dikategorikan menjadi tiga tipe, yakni (1) common fishing right, (2) set-net fishing right, dan (3) demarcated fishing right. Pertama, common fishing right merupakan hak yang diberikan kepada nelayan melalui koperasi perikanan di wilayah pesisir (coastal) dengan batas wilayah hingga dua km dari garis pantai. Dalam perkembangannya, hak ini dibagi lagi menjadi empat macam, yaitu: (a) hak untuk penangkap ikan spesies ikan dasar laut yang tidak bermigrasi, (b) hak untuk menangkap dengan alat tancap permanen di laut (stationary gear) pada kedalaman kurang dari 27 meter, (c) hak penangkapan ikan dengan beach seine, yang umumnya dilakukan di tepi pantai oleh para perempuan, dan (d) hak pada inland fisheries (perikanan darat). Dalam fishery right, diatur juga jenis spesies ikan yang boleh ditangkap, waktu penangkapan, jenis alat tangkap, dan metode penangkapan. Sangat tegas bahwa nelayan luar dari wilayah lain tidak diizini masuk dan beroperasi di wilayah tersebut.

Kedua, set-net fishing right merupakan hak penangkapan ikan dengan menggunakan jaring tancap (set net) pada kedalaman di atas 27 meter dengan wilayah tertentu sesuai dengan hak, umumnya untuk penangkapan ikan yang bermigrasi. Ketiga, demarcated fishing right, umumnya digunakan pada usaha budi daya ikan (mariculture) di pesisir yang sering berbentuk jaring apung. Hanya nelayan yang menjadi anggota koperasi perikanan yang dapat memperoleh fishery right tersebut (Lim et al. 1995). Selanjutnya, para nelayan itu pun dikenai “pajak” atas yang diperolehnya dengan pembayaran setiap tahun kepada koperasi.

Hak-hak tersebut dikeluarkan oleh pemerintah provinsi kepada koperasi-koperasi perikanan yang umumnya dimiliki setiap kota.
Koperasi sendiri di dalamnya terdapat komisi pengelola hak (*fishing right management committee*) yang mengatur hak-hak tersebut. Komisi ini selanjutnya akan berhubungan intensif dengan Komisi Koordinasi Perikanan Regional (*Regional Fishery Coordination Committees*) yang terdiri dari 15 anggota, 9 di antaranya mewakili nelayan, 4 mewakili orang yang mengetahui dan berpengalaman dalam pengelolaan perikanan regional, dan 2 sisanya mewakili kepentingan publik lainnya. Dengan komposisi seperti itu, tampak posisi nelayan sangatlah kuat. Komisi ini berfungsi untuk mengembangkan perencanaan pemanfaatan sumber daya perikanan, memberi sanksi pada nelayan yang melanggar peraturan, dan menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi di perairan pesisir.

BAB 8
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Topik pemberdayaan nelayan penting dikaji untuk mengatasi problem besar nelayan, yakni kemiskinan, ketertinggalan, ketertindasan, dan keterasingan. Sebagaimana sering disebutkan, hal tersebut merupakan hal yang ironis karena justru terjadi pada masyarakat yang bekerja di dalam sumber daya yang melimpah. Untuk itu, memang tidak ada jalan lain, selain mengeluarkan nelayan dari perangkap keterbelakangan. Pertanyaannya adalah bagaimana melakukan pemberdayaan yang efektif sehingga nelayan dapat mengalami mobilitas vertikal sekaligus keluar dari jebakan-jebakan yang memarginalkan posisinya? Namun, formulasi konsep pemberdayaan tersebut sulit dilakukan tanpa pemahaman tentang pergeseran paradigma pembangunan yang melatarbelakangi munculnya gagasan pemberdayaan dan pemahaman tentang karakteristik sosial nelayan, suatu kelompok manusia yang akan diberdayakan.

Pemberdayaan: Hasil Pergeseran Paradigma Pembangunan

Kemunculan istilah *pemberdayaan* sekitar pertengahan 1990-an merupakan isyarat terjadinya perubahan paradigma pembangunan. Pada mulanya, paradigma modernisme telah mendominasi baik dalam perencanaan maupun praktik pembangunan. Dalam
paradigma tersebut, menurut Sanderson (1993), paling tidak terdapat tiga asumsi pokok sebagai berikut:

(1) Keterbelakangan cenderung dilihat sebagai suatu "keadaan asli" (original state), sebagai suatu keadaan masyarakat yang telah ada dalam aneka bentuknya. Keterbelakangan itu terjadi akibat belum masuknya; kapitalisme, sehingga untuk keluar dari ketertinggalan, kapitalisme-lah jawabannya;

(2) Keterbelakangan merupakan akibat dari banyaknya kekurangan yang ada; di dalam suatu masyarakat, seperti kekurangan kapital sehingga untuk mengatasinya diperlukan formasi kapital baru melalui difusi modal dan teknologi;

(3) Masyarakat terbelakang biasanya tidak mempunyai semacam kesadaran atau mentalitas yang menawarkan perkembangan. Kemajuan dikatakan terjadi bila orang telah mengadopsi pemikiran rasional, nilai-nilai yang berorientasi masa depan, dan sistem etik. Sementara itu, umumnya nilai-nilai lokal masyarakat dianggap tidak kondusif bagi pencapaian kemajuan.

Jadi, dengan kata lain, menurut paradigma modernisme tersebut, masalah keterbelakangan suatu masyarakat berasal dari masyarakat itu sendiri, sehingga solusinya adalah perlunya bantuan dari pihak luar. Pihak luar inilah yang akan menata proyek pembangunan, dengan sejumlah keyakinan bahwa model yang akan diciptakannya bersifat universal sehingga terbebas dari dimensi ruang dan waktu.

Sering tidak disadari, bahwa para pengambil kebijakan pada masa lalu menganut aliran pemikiran modernisme. Bahkan, tidak sedikit pula akademisi yang terjebak pada perangkap ideologi modernisme. Adanya pencangkulan model koperasi perikanan ke semua wilayah secara homogen, serta tidak diakui karya manusia sebagai
tradisional untuk pengelolaan sumber daya (seperti sasi) dalam sistem hukum nasional, merupakan contoh kecil dari dominasinya aliran modernisme ini dalam praktik pembangunan di Indonesia.


Sebagai kritik terhadap ideologi modernisme, telah berkembang paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang lebih memberikan tempat kepada rakyat untuk turut serta dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proses pembangunan. Dalam payung paradigma inilah, wacana pemberdayaan (empowerment) mulai mulaat. Pemberdayaan merupakan upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat (Wahyono et. al 2001). Jadi, pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan masyarakat adalah penekanan pada pentingnya masyarakat lokal yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisasi diri mereka sendiri. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subjek yang menentukan hidup mereka
Dimensi dan Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Sosial


Sementara itu, dimensi struktural mencakup upaya perbaikan struktur sosial sehingga memungkinkan terjadinya mobilitas vertikal nelayan. Perbaikan-perbaikan struktural tersebut umumnya berupa penguatan solidaritas nelayan untuk selanjutnya dapat berhimpun dalam suatu kelompok dan organisasi yang mampu memperjuangkan kepentingan nelayan. Di sini tidak ada pretensi untuk selalu menciptakan koperasi nelayan karena apapun bentuk organisasi yang tercipta, yang terpenting adalah organisasi tersebut secara riil mampu menjamin kepentingan sosial ekonomi nelayan. Kehadiran organisasi tersebut -yang dijalankan sesuai dengan tingkat budaya organisasi nelayan setempat - juga diharapkan dapat menjadi institusi alternatif selain institusi patron-klien sebagaimana selama ini telah mengakar.

Terdapat empat akses dalam pemberdayaan masyarakat pesisir pada umumnya adalah: 1) Akses terhadap sumber daya alam; 2) Akses terhadap partisipasi; 3) Akses terhadap pasar; dan 4) Akses terhadap informasi dan pengetahuan. Pertama, akses
terhadap sumber daya adalah kemampuan masyarakat pesisir baik secara individu maupun berkelompok untuk dapat memanfaatkan sumber daya pesisir, perikanan dan kelautan. Kedua, akses terhadap partisipasi artinya adalah bahwa masyarakat pesisir mendapatkan partisipasi mulai dari informasi, input, proses sampai output dan outcome hasil dari partisipasi secara merata dan adil. Ketiga, akses terhadap pasar, artinya bahwa masyarakat pesisir yang sebagian besar adalah nelayan mampu menjual hasil tangkapannya dan mengetahui informasi dinamika pasar yang berkembang, seperti harga komoditas ikan tertentu sedang, naik atau informasi harga komoditas unggulan di daerah lain. Keempat, akses terhadap informasi dan pengetahuan adalah transformasi informasi, pengetahuan yang lancar antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Akses informasi meliputi ilmu pengetahuan meliputi teknik dan cara penangkapan yang ramah lingkungan, program bantuan dan pemberdayaan pemerintah, dinamika perkembangan permintaan dan penawaran pasar, cuaca dalam melaut, dan akses mendapatkan bahan bakar untuk keperluan melaut.

Harapannya dengan adanya pemberdayaan menciptakan masyarakat yang informed, memanfaatkan kesempatan akses terhadap pelayanan umum, menciptakan bridging social capital antara masyarakat pesisir yang satu dengan yang lain dalam satu kawasan, dan menciptakan linking social capital dalam berjejaring dengan pemerintah sehingga menciptakan kerjasama yang bersifat akuntabel dan transparansi atas kebijakan yang mengatur masyarakat.

Dalam pemberdayaan nelayan -baik secara struktural maupun kultural perlu dipahami adanya keunikan karakteristik sosial nelayan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, yang tentunya menuntut adanya pendekatan pemberdayaan yang unik pula. Namun, pendekatan yang unik ini pun tidak bisa digeneralisasi untuk seluruh konteks

1. Prinsip Tujuan

Pemberdayaan mesti dilandasi tujuan yang jelas, yang tentunya berbeda dengan tujuan yang didengung-dengungkan para penganut modernisme. Dalam modernisme, tujuan kedatangan kita dalam komunitas nelayan adalah mentransfer bantuan kepada nelayan, baik yang berupa pengetahuan, modal, teknologi, maupun yang lainnya. Nelayan dianggap sebagai receiver atas apa yang kita bawa dari luar yang sering kita anggap sebagai “obat mujarab”. Asumsinya adalah bahwa nelayan tidak punya apa-apa yang mampu mendorong mobilitas vertikal nelayan. Berbeda dari paradigma lama, dalam paradigma baru yang akan kita kembangkan, nelayan mesti dianggap sebagai subyek dalam pembangunan, sehingga pendekatan yang kita lakukan adalah to help them to help themselves, yakni membantu para nelayan agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dengan pendidikan orang dewasa (andragogi). Artinya, di sini kita hanya sebagai fasilitator dan bukan sebagai pihak yang terus memberi.

Dalam pendekatan baru ini, asumsinya adalah bahwa nelayan sebenarnya memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah dirinya sendiri.

2. Prinsip Pengetahuan dan Penguatan Nilai Lokal

Pengetahuan “modern” yang kita miliki sering dianggap segalagalanya dan ampuh untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi
nelayan, baik persoalan teknis maupun sosial. Padahal, seperti diketahui, bahwa nelayan memiliki sistem pengetahuan tersendiri yang penting dijadikan bahan atau bekal bagi pemberdayaan. Sistem pengetahuan yang dimiliki nelayan sudah cukup mengakar karena diwariskan secara turun-temurun. Sistem pengetahuan yang mereka miliki sudah sepatutnya membawa kita untuk sampai pada kesimpulan bahwa “nelayan adalah paling hebat di dunianya”. Karena itu, sudah sepatutnya pula kita mau mendengarkan sekaligus belajar dari pengetahuan yang mereka miliki.

Begitu pula berkaitan dengan nilai lokal, bahwa sebenarnya banyak nilai lokal yang potensial sebagai landasan dalam pemberdayaan. Nilai lokal tersebut dapat menjadi modal sosial yang cukup penting untuk dikembangkan bagi kemajuan masyarakat nelayan.

3. Prinsip Keberlanjutan (Sustainability)

upaya pemutusan hubungan melalui penggantian seluruh utang klien terhadap patron. Dengan bebasnya utang klien seolah-olah persoalan akan selesai, tanpa dipikirkan masakmasak bagaimana kondisi nelayan setelah "proyek" pemberdayaan itu selesai; apakah nelayan masih tetap bebas dari perangkap kebergantungan dengan patron?

Dengan demikian, prinsip keberlanjutan sering diabaikan dalam "proyek-proyek" pemberdayaan dan ini terjadi karena masih kuatnya paradigma "proyek" dalam setiap aktivitas pemberdayaan dan sifat proyek yang hanya sesaat, tidak multi years. Karena itu, perlu dipikirkan perubahan sistem administrasi proyek yang terkait dengan program pemberdayaan. Alhasil, program pemberdayaan bisa berjalan dengan efektif, tanpa ada batasan-batasan administrasi yang sering menghambat.

4. Prinsip Ketepatan Kelompok Sasaran

Mesti dipahami, bahwa setiap komunitas nelayan memiliki ciri stratifikasi sosial yang berbeda-beda. Ada yang mencirikan polarisasi dan ada pula yang tidak. Seperti digambarkan Chambers (1987), yang sering didatangi para tim pelaksana adalah justru para elit desa, yang sebenarnya jauh dari persoalan. Namun, karena elit desa lebih bisa berkomunikasi, kita sering pula menganjap bahwa suara mereka adalah suara "rakyat desa". Sebaliknya, nelayan miskin yang tidak bisa "membuka mulut" jarang kita datangi. Akibatnya, informasi yang kita peroleh sebenarnya bias bagi kepentingan informan elit nelayan tersebut.

Akibat lebih jauh, tidak sedikit program pemberdayaan yang hanya menyentuh elit nelayan dan bukan nelayan strata bawah yang sebenarnya merupakan pihak yang merasakan banyak masalah. Karena itu, sudah saatnya pemberdayaan sosial nelayan saat ini
berorientasi pada kelompok sasaran yang tepat, yakni kelompok nelayan yang berada dalam strata bawah untuk sebuah program tertentu.

5. Prinsip Kesetaraan Gender


Model-Model Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Salah satu model yang pernah dikembangkan pemerintah adalah program Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada tahun 2001 dengan prinsip to help them to help themselves. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan kelembagaan sosial ekonomi dengan pendayagunaan sumber daya laut dan pesisir secara berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan tujuan PEMP, dorongan pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelestarianan pembangunan. Kegiatan PEMP meliputi pengembangan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat, dan peningkatan fasilitas masyarakat dalam akses permodalan,
serta pengembangan kemampuan pemerintah lokal dan masyarakat. Penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat sendiri meliputi pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya laut dan pesisir dengan berbasis masyarakat yang sesuai keadilan kelentaran lingkungan, serta pengembangan jaringan dan kelembagaan sosial ekonomi.

Untuk mendukung program tersebut, kemitraan antara masyarakat, aparat dan swasta dalam mengembangkan kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat pantai perlu dibangun. Model pengembangan PEMP diawali dengan tahapan identifikasi potensi dan permasalahan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dasar tentang daerah. Informasi ini berupa informasi tentang sumber daya alam dan sumber daya pesisir, sumber daya manusia, kegiatan usaha perikanan, sarana dan prasarana, kelembagaan sosial ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Informasi (data) yang diperoleh akan melewati proses analisis data sehingga dihasilkan susunan program pengembangan PEMP.

Analisis data dilakukan untuk menghasilkan program-program pengembangan PEMP, mencakup program ekonomi, program sosial, program lingkungan, dan infrastruktur. Program-program tersebut hendaknya berbasisan kemampuan lokal, saling mendukung dan tidak tumpang-tindih. Dalam hal ini, program sosial, program lingkungan, dan infrastruktur dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat lokal. Selain itu, program sosial juga dilaksanakan untuk mengembangkan budaya lokal dalam kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mengantisipasi dan menyelesaikan konflik yang terjadi dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Tahapan selanjutnya adalah sosialisasi program kepada seluruh stakeholder untuk mendapatkan masukan konstruktif. Implementasi program dilaksanakan dalam bentuk pemilihan calon
peserta, pelatihan, pelaksanaan kegiatan ekonomi, pelaksanaan kegiatan sosial, lingkungan, fasilitas, dan penguatan kelembagaan sosial ekonomi. Dalam implementasi program, masyarakat selalu mendapatkan pendampingan dari Tenaga Pendamping Desa yang telah dilatih terlebih dahulu.

Tahap terakhir yang perlu dilakukan adalah monitoring dan evaluasi untuk memantau implementasi program serta mengkaji ulang kelemahan dan kelebihan dari program, termasuk kendalakendalanya. Pemantauan dan evaluasi harus selalu dilakukan agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan dalam program kerja sehingga semakin mengarah pada program yang sempurna. Secara skematis, model pengembangan PEMP dilihat pada gambar 4 di bawah ini:

Keberhasilan program PEMP sangat dipengaruhi oleh pendekatan yang digunakan dalam implementasi. Karena program PEMP melibatkan banyak unsur dan memiliki sasaran masyarakat pesisir dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, pendekatan yang dilakukan hendaklah bersifat persuasif dan aktif dari pemerintah pusat maupun daerah. Pendekatan yang digunakan dalam program PEMP ini adalah pendekatan partisipatif, kemandirian, dan kemitraan, dengan prinsip-prinsip pengelolaan yang bersifat acceptable, transparancy, accountability, responsiveness, quick disbursement, democracy, sustainability, equality, dan competitiveness.
Gambar 4. Model Pengembangan PEMP

Sumber: DKP (2002).
DAFTAR PUSTAKA


Sosiologi Masyarakat Pesisir


Daftar Pustaka

Management with Special mphass on Community based management System Development in Japan.


on Fisheries Management with Special mphass on Community based management System Development in Japan.


141
Daftar Pustaka


UU No 25 tentang Pemerintahan Daerah & UU tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.


INDEKS

ABK, 18, 29-31, 50, 64-65, 72-76, 78-80
Akses, 7, 129-130, 134
Ambrosius Oleona, 67
Anderson, 118, 127
Andragogi, 131
Andriati, 21
Anggraini, 46-47
Arif Satria, xii, 19, 22, 25, 29, 31, 37, 53, 55, 57, 62, 64-65, 73-74, 77-78, 80, 84, 86, 88, 111-113,
Arya Hidi Dharmawan, 11
awig-awig, 14, 87, 113-115
Blitar, 104
Borjuis, 66-67
BPPI, 59
BPS, 93-94, 97-99, 101, 103, bridging social capital, 130
Bugis, 58

cadranan, 19
Chambers, 133-134
Charles, 31-32
Cirebon, 57
Code of Conduct for Responsible Fisheries, 107
collective conscience, 14
Co-management, 108-109, 116
command and control, 109
commercial fisher, 30, 32
common fishing right, 124
community based management, 108-109, 111
cothok, 25
demarcated fishing right, 124
Denmark, 109
Indeks

Departemen Kelautan dan hand line, 34
Perikanan, viii, 1
Dimensi kultural, 129
Dimensi struktural, 129
Discovery, 56-57
Ditjen Perikanan, 27, 60
division of labour, 11, 14
DKP, 1, 9, 137
dugo-dugo, 16
Dyadic contract, 40

Emotional friendship, 39
Empowerment, 128
Enforcement, 25
Engels, 23

FAO, 116
Feodal, 63, 122-123
Filsafat Materialisme, 23
fisheries management, 106, 116
Fishing ground, 26, 85, 90, 92, 95, 129
fishing right, 118, 124-125
folk, 10, 14
Folk-society, 11

gillnet, 34, 59, 70
Goodwin, 22
GT (gross ton), 27

hak ulayat, 84, 113-114, 123

Hindia Belanda, 59, 107
Hirasawa, 123
HNSI, 23, 65-66
Hongkong, 45
Horton, 8

indigenous knowledge, 18, 114
Industrial fisher, 30
infrastruktur, 23, 135, 137,
Instrumental friendship, 39
ITQ, 118-121

James Scott, 40
juragan darat, 28
juragan laut, 28, 45
juragan, 65, 68-69
juragan-pandega, 68
Juwono, 16-17, 41, 68-70

Kamanto Sunarto, 38-39
Kapal long line, 3, 93
kapitalis, 62
Kawaguchi, 122
 kemiskinan absolut, 92-93
 kemiskinan kultural, 104, 129,
 kemiskinan relatif, 92-93
 Kepulauan Natuna, 25, 44
 Kepulauan Fiji, 59
 kesadaran kolektif, 14
 Koentjaraningrat, 9-11, 13-14, 38,
 40, 56-57
Sosiologi Masyarakat Pesisir

Komblum, 37
Komoditas, 7, 54, 75-76, 98, 100, 130
Konflik cara produksi atau alat tangkap, 89
konflik cara tangkap atau alat produksi, 85
konflik kelas, 88-89
konflik kepemilikan sumber daya, 85-86
Konflik lingkungan, 86
Konflik primordial, 86
Konflik usaha, 86
Konsep Formasi Sosial, 86
Kusnadi, 21, 51, 62, 68, 71-72

lampara malam, 75-76
lampara siang, 75-76
langgan, 42-44
large scale fisherman, 29
Linking social capital, 130
Lombok, 14, 86, 113
Lovoten Law, 117
LSM, 3, 114

Maluku, 14, 110, 113
Maori, 24
mariculture, 124
Marxis, 23
masyarakat agraris, 7
Masyhuri Imron, 41
Matsuda, viii, 111,
Maya Samiya, 46, 48-49

mini purse seine, 5, 35
mode of production, 62
Morisawa, 122
Muara Angke, 25, 92, 105,
Muara Baru, 3, 93
Muflikhati, 93-97

Native/indigenous/aboriginal
fishers, 32
nelayan ikan dasar, 37
nelayan lampara siang, 75-76
nelayan perahu layar, 34
nelayan sampan, 34
nelayan tombak, 34
nelayan tradisional, 1-2, 24-25, 29, 45, 55, 63-64, 85-89
nelayan tuna, 75, 78
nelayan udang, 36
Nikijuluw, 109, 115, 117
Nilai Tukar Nelayan (NTN), 100-103
modernisasi 50, 52, 57-60
NTP, 98-99

one day fishing, 2
one week fishing, 2
open access, 7, 84, 118
overexploitation, 115

panglima laot, 87
pantura Jawa, 3
Papalele, 35, 44, 75-76,
Indeks

Papua, 3
patron-klien, 2, 6, 38, 41-46, 104-105, 129, 132
peasant community, 12-13
peasant-fisher, 29-30
pengetahuan lokal, 16, 114
people centered development, 128
Perhadi, 17
Pieter Tedu Bataona, 67
PKSPL IPB, ix, 17, 41, 88
Pollnac, 20, 29-30,
Pomeroy, 116
post-peasant fisher, 30
poverty line, 93
principle of reciprocity, 40
prinsip kesetaraan gender, 134
profit oriented, 31
pukat harimau, 84
Pulau Busung, 42, 87-88
Pulau Karimun, 26, 89
Punggawa, 45
purse seine, 5, 30, 35, 64, 72-73

Ralp Linton, 8, 56
Rapid Appraisal for Fisheries, 18
Raymond Firth, 8, 22, 29-30
recreational fisher, 32
Redfield, 10-13
Regional Fishery Coordination Committees, 125
Resolusi konflik, 90
Restorasi Meiji, 123
Riau, 3, 42, 89, 92
ritualisme, 20

Rokhim Dahuri, viii, 26, 105-106,
Sajogjo, 8, 44-45, 93, 128
sampan berkajang, 4
Sanderson, 127
Sape-Bima, 41
Sarman, 44-45
sasi, 14
sanyi, 24, 86, 111,
Sato, 123
Seafood Savers, 87
sedekah laut, 13, 19
Selandia Baru, 24
Sero/lutu, 42-42
set net fishing right, 124
Sitorus, 8, 81
small scale fisherman, 29
Soewito, 59-60, 108
solidaritas mekanik, 14
solidaritas organik, 14-15
soyu (communal ownership), 122
subsistence fishers, 32
suku laut, 3-5, 17, 42, 92
Sulawesi Selatan, 44
sumber daya hayati laut, 125
Suncoko, 54, 61, 78, 80, 87, 88
Suprastruktur, 23
Suro, 19
Susenas, 94
Taiwan, 44
Taman Nasional, 48
Tanjung Pinang, 87-88
Sosiologi Masyarakat Pesisir

tauke, 3, 42
Tenaga Pendamping Desa, 136
tengkulak, 3, 48-49

_territorial use right_, 118, 122
_the poorest of the poor_, 92
tipologi nelayan, 6, 31-34, 74-75
_tragedy of the common_, 118
_trawl_, 24-25, 57, 63-64, 85-89
_tribal community_, 12

_under capacity_, 58

_Wakatobi_, 60, 87
_Wolf_, 3, 39
_Wright_, 66-67

_Zanden_, 52
_ZEEI, 58
_zero sum game_, 63, 121

147
TENTANG PENULIS


Beberapa penghargaan yang pernah ia peroleh diantaranya:
